

IMPLEMENTASI INDEKS PEMBANGUNAN ZAKATNOMICS 2021

Studi Kasus Di 9 Provinsi Di Indonesia



Penelitian ini merupakan hasil kerja sama antara
BAZNAS RI dan LAZISMU

IMPLEMENTASI INDEKS PEMBANGUNAN ZAKATNOMICS 2021

Studi Kasus Di 9 Provinsi Di Indonesia



IMPLEMENTASI INDEKS PEMBANGUNAN ZAKATNOMICS: STUDI KASUS DI 9 PROVINSI DI INDONESIA

Kata Pengantar Ketua BAZNAS
Kata Pengantar Ketua Badan Pengurus LAZISMU

Penyusun:

Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional
bekerjasama dengan Research and Development – LAZISMU

Penyunting:

Pimpinan BAZNAS
Direktur Utama BAZNAS
Badan Pengurus LAZISMU
Direktur LAZISMU

Penerbit:

Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS)

Gedung Kebangkitan Jl. Matraman Raya No.134, Jakarta 13150

+6221 390 4555

puskas@baznas.go.id

www.baznas.go.id; www.puskasbaznas.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan bentuk dan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-6614-96-9

TIM PENYUSUN

Penasihat:

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA
Mokhamad Mahdum, SE, MIDEc, Ak, CA, CPA, CWM
Ir. H. Muhamad Nadrattuzaman Hosen, MS.MEc, Ph.D
Dr. Zainulbahar Noor, SE, Mec
Saidah Sakwan, MA
Rizaludin Kurniawan, S.Ag, M.Si
Kolonel (Purn) Drs. Nur Chamdani
Achmad Sudrajat, Lc, M.A
Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA
Suminto M.Sc Ph.D
M. Arifin Purwakananta
Dr. H. Ahmad Zayadi, M.Pd
Prof. Dr. Hilman Latief, M.A., Ph.D
Dr. Mahli Zainuddin Tago, M.Si
Dr. Nurhayadi Wijihardjono. S.E., M.M
M. Nurul Ihsan, S.T
Muarawati Nurmalinda, MPA
Barry Adhitya, S.Psi
Andar Nubowo, DEA
Eny Muslichah Wijayanti, S.E., M.Si.
Joko Inarto, SH
Dr. Mahsunah Syakir, S.E., M.E.K
Moh. Danial Ramli, S.H.
Drs. H. Muhammad Gembong Pratondo, S.H
Erni Juliana, S.E., M.Ak.
Muhammad Sabeth Abilawa
Edi Suryanto
Edi Muktiono

Ketua:

Mohammad Hasbi Zaenal, Ph.D.

PUSKAS BAZNAS:

Dr. Muhammad Choirin
Abdul Aziz Yahya Saoqi, M.Sc
Hidayaneu Farchatunnisa, SE
Arwa Violaditya Rarasocta, SKPm
Ulfah Lathifah, B.Sc

RnD LAZISMU:

Sita Rahmi BS, SE, MA
Listiono, MSc
Riza Egi Arizona, SE

KATA PENGANTAR

KETUA BAZNAS

*Assalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh
Bismillahirrahmanirahim,*

Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia memiliki potensi dan prospek zakat yang besar. Penguatan Kelembagaan BAZNAS saat ini penting untuk dilakukan mengingat pengelolaan zakat di Indonesiannya juga telah banyak diadopsi oleh beberapa lembaga zakat dunia. Dalam rangka terus mengembangkan pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional melalui Pusat Kajian Strategis BAZNAS rutin mengeluarkan kajian-kajian teranyar untuk mendukung kemajuan pengelolaan zakat baik dari segi pengumpulan, pendistribusian, serta operasional secara umum.

Pada tahun 2020 Pusat Kajian Strategis BAZNAS membuat buku Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN), dan pada tahun 2021 ini Puskas BAZNAS melakukan implementasi IPZN ini di 9 Provinsi di Indonesia dengan harapan dapat memotret sejauh mana suatu ekonomi zakat diterapkan oleh stakeholder di suatu daerah. Konsep ekonomi zakat atau Zakatnomics itu sendiri adalah kesadaran untuk membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemulyaan hakiki manusia yang didasari dari semangat dan nilai-nilai luhur syariat zakat.

Konsep dan alat ukur Indeks Pembangunan zakatnomics ini perlu untuk diterapkan para stakeholder zakat dalam pengelolaan zakat dengan tujuan membuka segala keterbatasan akses yang dihadapi mustahik yang pada akhirnya dapat mensejahterakan mustahik termasuk pada masa Pandemi Covid 19 saat ini. Sebagai bentuk pertanggungjawaban bersama, kami secara terbuka menerima kritik dan saran konstruktif untuk menyempurnakan kajian ini agar sesuai dengan kebutuhan umat.

Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarokatuh

Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA

Ketua BAZNAS

KATA PENGANTAR

KETUA BADAN PENGURUS LAZISMU

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Bismillahirrahmanirrahim,*

Buku Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN) ini merupakan laporan implementasi pembangunan ekonomi syariah di 9 Provinsi di Indonesia dimana dalam penelitiannya dilakukan secara kolaboratif antara Baznas dan Lazismu. Kajian bersama perlu terus digalakkan untuk memperkaya khasanah literasi di dunia zakat serta mengarusutamakan pentingnya pengambilan kebijakan strategis berbasis data ilmiah di lingkungan lembaga pengelola zakat.

Zakat merupakan pilar penting dalam pembangunan ekonomi syariah. Dalam kajian ini, zakatnomics dipahami sebagai sebuah konsep ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai spiritualitas yang terkandung dalam perintah berzakat. Dari hasil kajian IPZN ini para pembaca akan mengetahui bagaimana gambaran pembangunan zakat di sebuah provinsi dengan memperhatikan aspek spiritualitas, produktivitas, keadilan ekonomi, serta kondisi institusi ZISWAF di provinsi tersebut.

Hasil dari pengukuran indeks ini diharapkan mampu menjadi wawasan bagi masyarakat bahwa suatu daerah atau provinsi memiliki nilai atau bobot yang beragam dalam menjalankan ekonomi syariah. Bagi lembaga zakat, nilai indeks pembangunan zakatnomics menjadi peta dasar dalam strategi edukasi dan penghimpunan zakat di suatu wilayah. Kajian ini masih memerlukan masukan dari berbagai pihak untuk lebih memperdalam dan memperluas cakupan wilayah kajian. Adapun atas kerjasama yang telah dijalankan kami ucapkan terimakasih, semoga buku ini bermanfaat bagi umat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dr. Mahli Zainuddin, M.Si

Ketua Badan Pengurus LAZISMU

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR KETUA BAZNAS	ii
KATA PENGANTAR KETUA PENGURUS LAZISNU	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	7
2. DATA DAN METODOLOGI	9
2.1. Jenis dan Sumber Data	10
2.2. Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Pembangunan Zakatnomics	10
2.3. Metode dan Tahapan Perhitungan IPZN	12
2.4. Kriteria Penilaian Indeks Pembangunan Zakatnomics	13
3. HASIL PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN ZAKATNOMICS	15
3.1. Provinsi DKI Jakarta	23
3.2. Provinsi Jawa Barat	27
3.3. Provinsi Jawa Tengah	31
3.4. Provinsi Sulawesi Selatan	36
3.5. Provinsi Sumatera Barat	41
3.6. Provinsi Sumatera Utara	46
3.7. Provinsi Kalimantan Timur	51
3.8. Provinsi Kalimantan Selatan	56
3.9. Provinsi NTB	60
4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	63
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Rekomendasi	66
REFERENSI	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dimensi, Variabel, dan Indikator Indeks Pembangunan Zakatnomics	11
Tabel 2.2 Klasifikasi Penilaian Indeks Pembangunan Zakatnomics.....	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daftar Negara yang Masuk dalam 10 Besar dengan Kinerja Ekonomi Syariah Terbaik Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021	2
Gambar 1.2 Dimensi dan Variabel Indeks Pembangunan Zakatnomics	6
Gambar 3.1 Nilai Indeks Pembangunan Zakatnomics 9 Provinsi	16
Gambar 3.2 Nilai Dimensi Spiritual IPZN.....	17
Gambar 3.3 Nilai Dimensi Produktivitas IPZN	18
Gambar 3.4 Nilai Dimensi Keadilan Ekonomi IPZN	19
Gambar 3.5 Nilai Dimensi Institusi ZISWAF IPZN.....	20
Gambar 3.6 Nilai Dimensi IPZN Provinsi DKI Jakarta	23
Gambar 3.7 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Jawa Barat.....	27
Gambar 3.8 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Jawa Tengah	32
Gambar 3.9 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Sulawesi Selatan	37
Gambar 3.10 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Sumatera Barat	42
Gambar 3.11 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Sumatera Utara	46
Gambar 3.12 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Kalimantan Timur	52
Gambar 3.13 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Kalimantan Selatan	56
Gambar 3.14 Nilai Dimensi IPZN Provinsi NTB	60

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang ekonomi syariah. Menurut data yang diperoleh nilai ekonomi syariah pada tahun 2019 mencapai 80% dari nilai PDB Indonesia dengan nilai 12,8 ribu triliun dari 16 ribu triliun nilai PDB (Waluyo, 2019). Zakat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi syariah yang disebutkan dalam MEKSI (KNEKS, 2019). Hal ini dikarenakan Zakat memiliki potensi pengumpulan yang cukup besar dengan potensi pengumpulan Zakat mencapai 300 triliun rupiah dalam satu tahun (Puskas BAZNAS, 2020).

BAZNAS pada tahun 2019 memperkenalkan konsep Zakatnomics. Zakatnomics adalah sebuah konsep ekonomi yang berbasiskan spirit value dalam zakat. Zakatnomics terdiri dari pilar Spiritualitas, Produktivitas, Keadilan Ekonomi dan juga Kepedulian dimana pilar-pilar tersebut merupakan turunan dari nilai-nilai yang ada dalam Zakat (Puskas BAZNAS; PEBS UI, 2019).

Pada tahun 2020, BAZNAS juga mengembangkan konsep tersebut ke dalam sebuah alat ukur yang dinamakan Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN) dimana alat ukur tersebut bertujuan untuk menyediakan alternatif pengukuran kinerja ekonomi syariah secara inklusif berbasiskan pilar-pilar yang ada pada Zakatnomics (Puskas BAZNAS, 2020). Secara umum terdapat empat dimensi penyusun Zakatnomics, yaitu dimensi spiritualitas, dimensi produktivitas, dimensi keadilan ekonomi dan dimensi institusi ZISWAF.

Pada tahap awal implementasi IPZN dilakukan di 9 provinsi di Indonesia. Provinsi yang menjadi sampel penelitian ini adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Implementasi IPZN tahun 2021 ini dilakukan di 9 provinsi di Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Secara umum Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai IPZN tertinggi dengan skor 0,68 yang masuk dalam kategori baik. Disusul dengan Provinsi DKI dan Sumatera Barat dengan skor 0,67 yang juga masuk dalam kategori baik. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki skor 0,66 yang juga masuk dalam kategori baik. Provinsi Jabar berada pada ranking 6 dengan skor 0,65 yang masuk dalam kategori baik. Ranking ke 7 adalah provinsi NTB dengan skor 0,63 masuk dalam kategori baik, Ranking ke 8 adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan skor 0,62 yang juga masuk kategori baik dan di Ranking ke 9 adalah Provinsi Sumatera Utara dengan skor 0,60 yang masuk dalam kategori cukup baik.

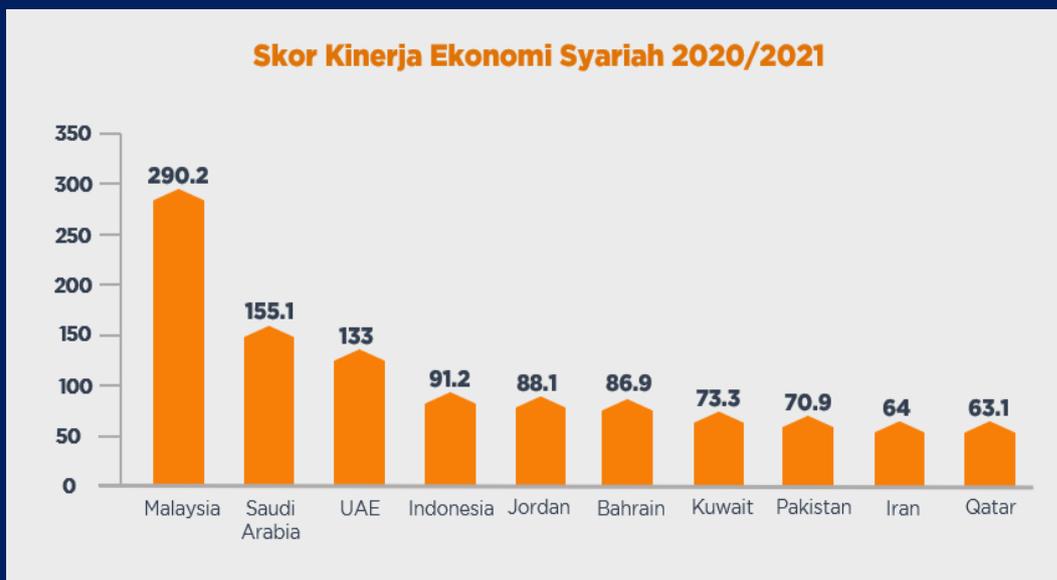


1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam bidang ekonomi syariah. Menurut data yang diperoleh nilai ekonomi syariah pada tahun 2019 mencapai 80% dari nilai PDB Indonesia dengan nilai 12,8 ribu triliun dari 16 ribu triliun nilai PDB (Waluyo, 2019). Maka tidaklah heran jika Indonesia juga masuk dalam peringkat lima besar dalam *State of Global Islamic Economy Report* tahun 2020 sebagai salah satu *leading player* dalam ekonomi syariah di tingkat global baik dari aspek keuangan syariah, industri halal, dan pariwisata halal (DinarStandard, 2020).



Gambar 1.1 Daftar Negara yang Masuk dalam 10 Besar dengan Kinerja Ekonomi Syariah Terbaik Menurut Laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021

Sumber: State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021

Untuk semakin memperkuat posisi Indonesia dan mendukung visi pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia pada tahun 2045, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) dibentuk dimana MEKSI bertujuan untuk menyediakan *blue print* pembangunan ekonomi syariah Indonesia pada kurun 2019-2024.

Zakat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi syariah yang disebutkan dalam MEKSI (KNEKS, 2019). Hal ini dikarenakan Zakat memiliki potensi pengumpulan yang cukup besar dengan potensi pengumpulan Zakat mencapai 300 triliun rupiah dalam satu tahun (Puskas BAZNAS, 2020). Potensi zakat terbesar adalah pada sektor zakat perusahaan yaitu mencapai 140 Triliun lebih pada tahun 2019, potensi zakat tertinggi kedua adalah zakat penghasilan yang mencapai 135 Triliun lebih, selanjutnya adalah potensi zakat uang yang mencapai 58 triliun rupiah, zakat pertanian 19 triliun dan zakat peternakan hampir 10 triliun per tahun di tahun 2019. Oleh karena itu, Zakat berpotensi untuk menjadi bagian yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi syariah di Indonesia.

Sebagai lembaga negara yang berwenang dalam melakukan pengendalian dan pengelolaan zakat secara nasional, BAZNAS turut berperan aktif dalam mendukung kinerja ekonomi syariah Indonesia melalui zakat. Untuk semakin mendorong integrasi sektor zakat dan juga pembangunan ekonomi syariah, BAZNAS pada tahun 2019 memperkenalkan konsep Zakatnomics. Zakatnomics adalah sebuah konsep ekonomi yang berbasis *spirit value* dalam zakat. Zakatnomics terdiri dari pilar Spiritualitas, Produktivitas, Keadilan Ekonomi dan juga Kepedulian dimana pilar-pilar tersebut merupakan turunan dari nilai-nilai yang ada dalam Zakat (Puskas BAZNAS; PEBS UI, 2019).

Pada tahun 2020, BAZNAS juga mengembangkan konsep tersebut ke dalam sebuah alat ukur yang dinamakan Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN) dimana alat ukur tersebut bertujuan untuk menyediakan alternatif pengukuran kinerja ekonomi syariah secara inklusif berbasiskan pilar-pilar yang ada pada Zakatnomics (Puskas BAZNAS, 2020).

Sejak adanya pandemi COVID-19 dalam hampir dua tahun ini, berbagai sektor mengalami adaptasi terhadap situasi pandemi termasuk sektor keuangan. Hal ini tentu juga mempengaruhi pengelolaan dan pendistribusian zakat sebagai salah satu sektor keuangan islam. Oleh karena itu, beberapa dimensi dan variabel pada implementasi Zakatnomics pada tahun 2021 ini telah disesuaikan dengan keadaan pandemi saat ini. Secara umum terdapat empat dimensi penyusun Zakatnomics, yaitu dimensi spiritualitas, dimensi produktivitas, dimensi keadilan ekonomi dan dimensi institusi ZISWAF.

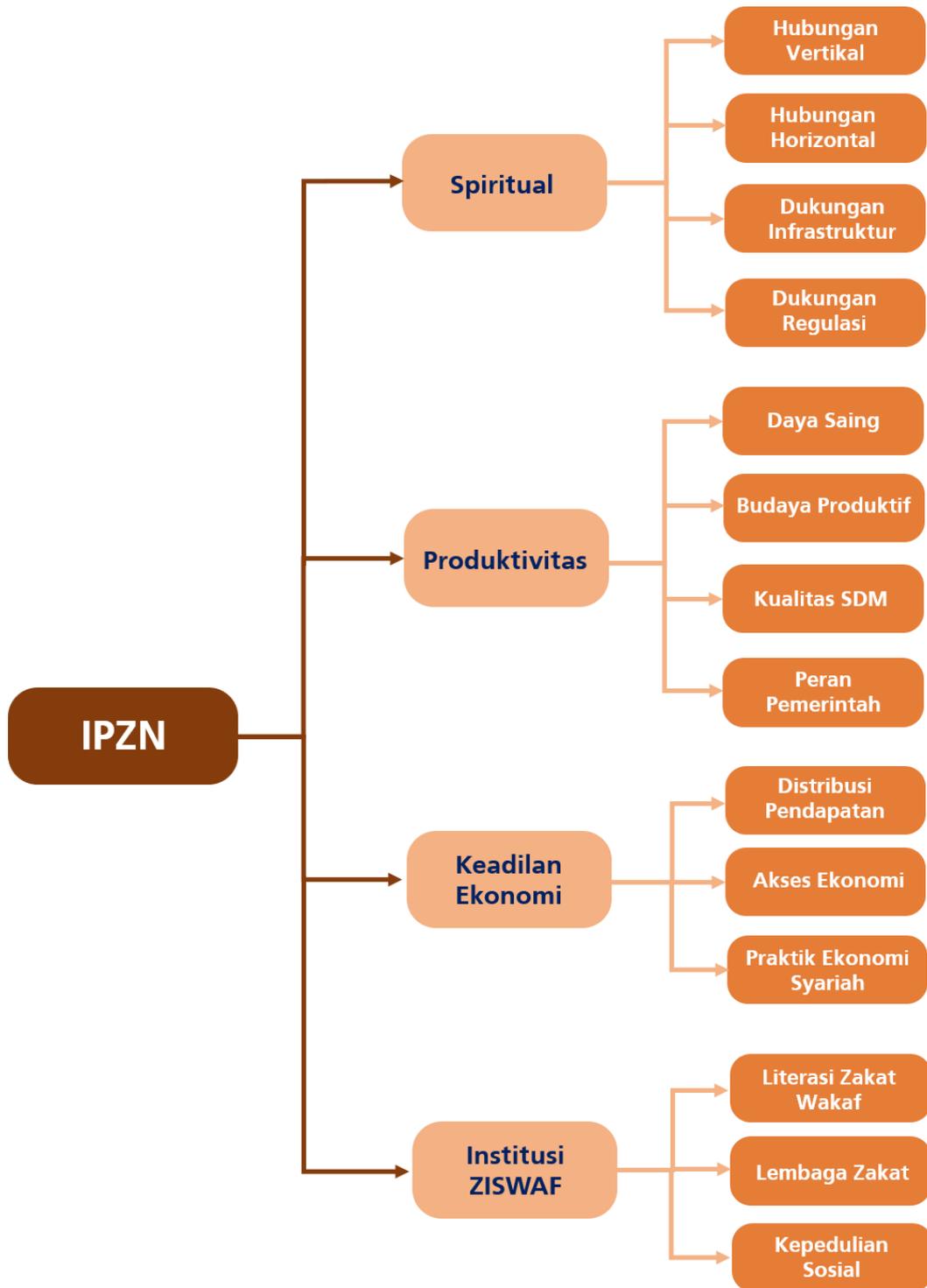
Dimensi Spiritualitas ini mengukur tingkat spiritualitas dari sebuah wilayah baik pada kondisi spiritual secara vertikal (terhadap Allah) maupun secara horizontal (terhadap sesama manusia). Pada dimensi pertama ini juga mengukur infrastruktur dan regulasi di wilayah tersebut apakah memiliki pengaruh yang cukup signifikan sebagai faktor pendukung dalam mewujudkan lingkungan spiritual yang kuat pada wilayah atau tidak.

Dimensi kedua yaitu dimensi produktivitas yang berfokus pada peran masyarakat dan pemerintahan setempat dalam mewujudkan lingkungan dan budaya produktif dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Seperti yang kita ketahui, zakat merupakan sebuah instrumen yang dapat membantu mewujudkan kesejahteraan umat, sehingga dimensi ini merupakan aspek penting dalam indeks zakatnomics. Produktivitas dapat diukur dari tingkat daya saing dan budaya produktif, kualitas sumber daya manusia dan juga peran pemerintahan dalam mendorong masyarakat untuk terus berinovasi dan mencapai pertumbuhan ekonomi.

Keadilan ekonomi fokus pada kegiatan ekonomi yang dilakukan pada wilayah tersebut dan bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah setempat. Keadilan ekonomi tidak hanya memperhatikan kegiatan ekonomi konvensional tetapi juga kegiatan ekonomi syariah. Oleh karena itu, dimensi ini diukur dari distribusi pendapatan, akses ekonomi masyarakat dan praktik ekonomi syariah.

Dimensi terakhir adalah dimensi institusi ZISWAF, pada dimensi mengevaluasi implementasi dan dukungan terhadap institusi ekonomi syariah seperti Zakat, Infak, Shadaqah, dan Waqf. Dalam dimensi ini akan dilihat bagaimana literasi Zakat dan Wakaf yang merupakan faktor pendorong dari kesadaran seseorang untuk membayar zakat dan wakaf. Selain itu pada dimensi ini juga dijelaskan peran dan kontribusi dari institusi zakat pada wilayah setempat dan bagaimana institusi-institusi ini mempengaruhi masyarakat melalui distribusi zakat juga merupakan variabel-variabel yang dimuatkan pada dimensi ini.

Pengukuran kinerja ekonomi syariah menggunakan IPZN dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kinerja ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuangan syariah dan juga industri halal tetapi juga aspek lain yang lebih luas seperti dukungan pemerintah, serta kinerja zakat dan wakaf yang merupakan bagian yang sangat penting dalam ekosistem ekonomi syariah. Sehingga, hasil dari pengukuran IPZN dapat menjadi salah satu referensi yang komprehensif bagi *policy makers* untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi syariah di wilayahnya masing-masing.



Gambar 1.2 Dimensi dan Variabel Indeks Pembangunan Zakatnomics

Sumber: Puskas 2021

1.2. Tujuan

Dari paparan yang disampaikan di atas, maka terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai dalam Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics yaitu:

- 1) Melakukan pengukuran kinerja ekonomi syariah di beberapa wilayah yang telah ditetapkan menggunakan alat ukur Indeks Pembangunan Zakatnomics.
- 2) Menyusun laporan hasil pengukuran kinerja ekonomi syariah di wilayah-wilayah yang telah ditetapkan menggunakan alat ukur Indeks Pembangunan Zakatnomics.
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait terutama pemerintah daerah terkait pembangunan ekonomi syariah berdasarkan hasil penelitian pada pengukuran kinerja ekonomi syariah menggunakan alat ukur Indeks Pembangunan Zakatnomics



2

DATA DAN METODOLOGI

2.1 Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sifat data, implementasi IPZN menggunakan data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari data internal suatu organisasi dan data eksternal. Sedangkan jika dilihat berdasarkan cara memperoleh data, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), database Puskas BAZNAS, data IZN, website provinsi, dan beberapa website kementerian terkait.

Pada tahap awal implementasi IPZN dilakukan di 9 provinsi di Indonesia. Provinsi yang menjadi sampel penelitian ini adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Teknis pengambilan sampel pada penentuan provinsi adalah purposive sampling dengan pertimbangan setiap provinsi mewakili setiap pulau di Indonesia.

2.2 Dimensi, Variabel dan Indikator Indeks Pembangunan Zakatnomics

Dalam konteks penyusunan Indeks Pembangunan Zakatnomics terdapat empat dimensi utama yang dijadikan indikator utama dalam pengukuran kinerja ekonomi syariah yaitu dimensi Spiritualitas, Produktivitas, Keadilan Ekonomi, dan juga Institusi ZISWAF. Kemudian, dari dimensi-dimensi tersebut diturunkan ke dalam variabel-variabel relevan yang dapat merepresentasikan kinerja dari setiap variabel pada Indeks Pembangunan Zakatnomics. Dimensi, Variabel serta indikator dalam Indeks Pembangunan Zakatnomics telah melalui verifikasi yang cukup Panjang dan juga ilmiah Bersama para pakar, praktisi dan juga akademisi yang memiliki *expertise* dalam bidangnya masing-masing.

Tabel 2.1 Dimensi, Variabel dan Indikator Indeks Pembangunan Zakatnomics

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Spiritual	Hubungan Vertikal	1. Modified Spiritual Poverty Line 2. Potensi Rawan Pemurtadan
	Hubungan Horizontal	1. Kebersihan 2. Keamanan 3. Indeks Kebahagiaan
	Dukungan Infrastruktur	1. Jumlah Masjid 2. Lembaga Pendidikan non Pesantren 3. Jumlah Pesantren
	Dukungan Regulasi	1. Jenis Perda Syariah 2. Jumlah bantuan Pemerintah ke Lembaga Zakat
Produktivitas	Daya Saing	1. Inovasi dan kreatifitas 2. Kemiskinan
	Budaya Produktif	1. Jumlah Pengusaha 2. Pertumbuhan UMKM 3. PAD (Pendapatan Asli Daerah)
	Kualitas SDM	1. IPM Islami 2. Demografi dan Ekonomi 3. Tingkat APM
	Peran Pemerintah	1. Visi dan Misi 2. Indeks Pembangunan Desa
Keadilan Ekonomi	Distribusi Pendapatan	1. Gini Ratio/ Atkhison 2. Elastisitas PAD terhadap PDRB
	Akses Ekonomi	1. Equal access to employment 2. Equal access to financial service 3. Daya beli Konsumen
	Praktik Ekonomi Syariah	1. Pembiayaan Syariah 2. DPK Bank Syariah 3. Muzakki

DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR
Intuisi ZISWAF	Literasi Zakat Wakaf	1. Indeks Literasi Zakat 2. Indeks Literasi Wakaf
	Lembaga Zakat	1. Pengumpulan Dana ZIS 2. ACR (Seluruh Lembaga Zakat) 3. Jumlah UPZ di BAZNAS Provinsi dan Kabupaten Kota 4. Database Mustahik
	Kepedulian Sosial	1. Penyaluran Dana ZIS

sumber: Puskas BAZNAS 2021

2.3 Metode dan Tahapan Penghitungan IPZN

Lebih lanjut, metodologi yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics menggunakan penghitungan indeksasi dengan metode sekaran (2003) dan juga menggunakan metode penghitungan *Multi-Stage Weighted Index* yang telah dikembangkan oleh Puskas BAZNAS (2017) dimana metode tersebut melakukan penghitungan indeks secara prosedural dan bertahap yang dimulai dari penghitungan setiap variabel atau elemen i sampai pada tahapan dimensi untuk kemudian mendapatkan nilai indeks dengan formulasi sebagaimana berikut:

$$Indeks_{total} = \sum_n^i \left((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k \right)$$

Dimana:

$Indeks_{total}$: Total nilai Indeks

WD^i : Nilai Pembobotan pada dimensi i

WV_n^i : Nilai Pembobotan pada variable n di dimensi i

S_n^i : Nilai skala likert rata-rata pada indikator di variabel n di dimensi i

k : Jumlah skala likert yang digunakan

2.4 Kriteria Penilaian Indeks Pembangunan Zakatnomics

Dalam menentukan dan menganalisa hasil pengukuran, Indeks Pembangunan Zakatnomics menyediakan klasifikasi penilaian dengan menggunakan skala 0 – 1 dan rating bintang satu sampai lima sebagai basis penilaian, dimana 0 merupakan nilai terendah dan 1 adalah nilai tertinggi. Terdapat lima level kategori penilaian dimana nilai 0.00 – 0.20 masuk dalam kategori tidak baik dengan bintang 1 (*), 0.21 – 0.40 masuk dalam kategori penilaian kurang baik dengan bintang 2 (**), 0.41 – 0.60 masuk dalam kategori penilaian cukup baik dengan bintang 3 (***). Adapun rentang nilai di antara 0.61 – 0.80 masuk dalam kategori penilaian yang baik dengan bintang 4(****), sedangkan rentang nilai yang masuk di antara 0.81 – 1.00 masuk dalam kategori penilaian sangat baik dengan bintang 5(*****).

Tabel 2.2 Klasifikasi Penilaian Indeks Pembangunan Zakatnomics

Rentang Nilai	Kategori	Rating/Pemeringkatan
0.00 – 0.20	Tidak Baik	*
0.21 – 0.40	Kurang Baik	**
0.41 – 0.60	Cukup Baik	***
0.61 – 0.80	Baik	****
0.81 – 1.00	Sangat Baik	*****

Sumber: Puskas BAZNAS 2020

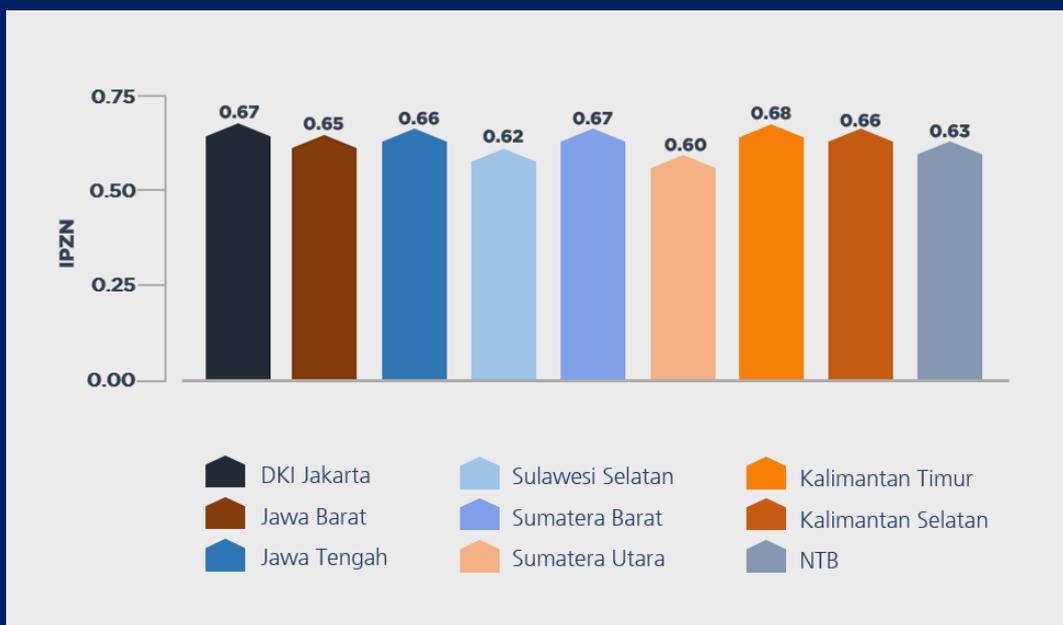


3

**HASIL
PENGUKURAN
INDEKS
PEMBANGUNAN
ZAKATNOMICS**

3.1 Nilai Indeks Pembangunan Zakatnomics 9 Provinsi

Pada tahun 2021, pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics dilakukan di 9 provinsi. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 8 provinsi yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan NTB masuk dalam kategori baik (nilai 0,61-0,80), sementara Sumatera Utara masih dalam kategori cukup baik (nilai 0,41-0,60). Nilai IPZN tertinggi diperoleh provinsi Kalimantan Timur (0,68) sedangkan Provinsi Sumatera Utara mendapatkan nilai terendah (0,60).



Gambar 3.1 Nilai Indeks Pembangunan Zakatnomics 9 Provinsi

Sumber: Data di olah, 2021

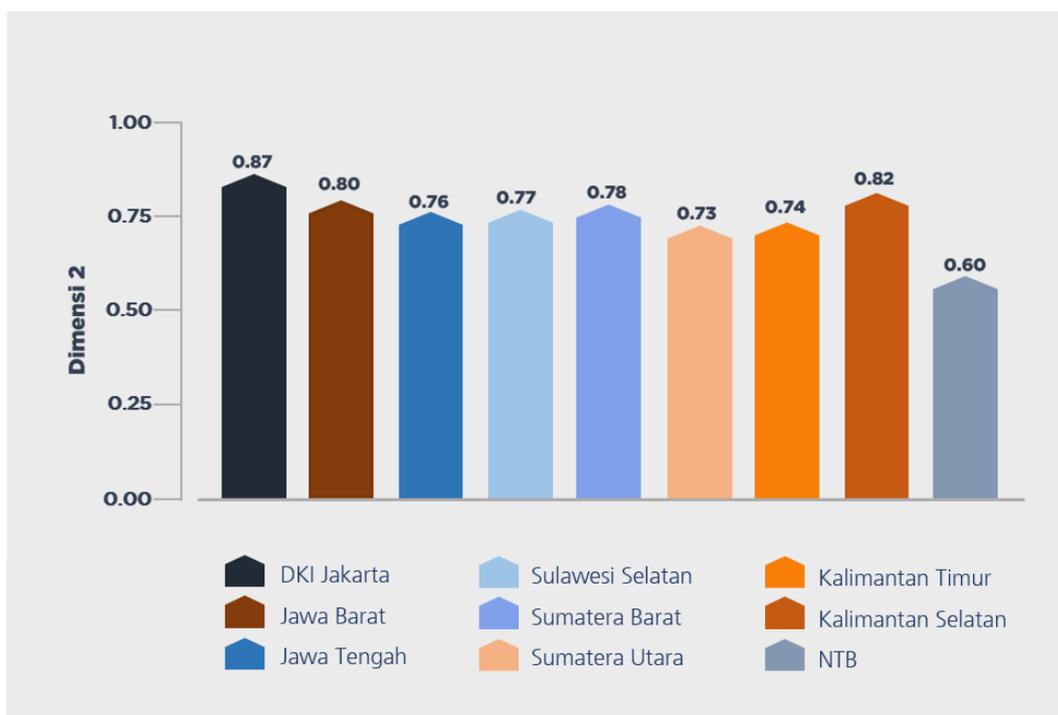
Berikut ini akan disajikan nilai rata-rata Indeks Pembangunan Zakatnomics dilihat berdasarkan Dimensi.



Gambar. 3.2 Nilai Dimensi Spiritual IPZN

Sumber: Data di olah, 2021

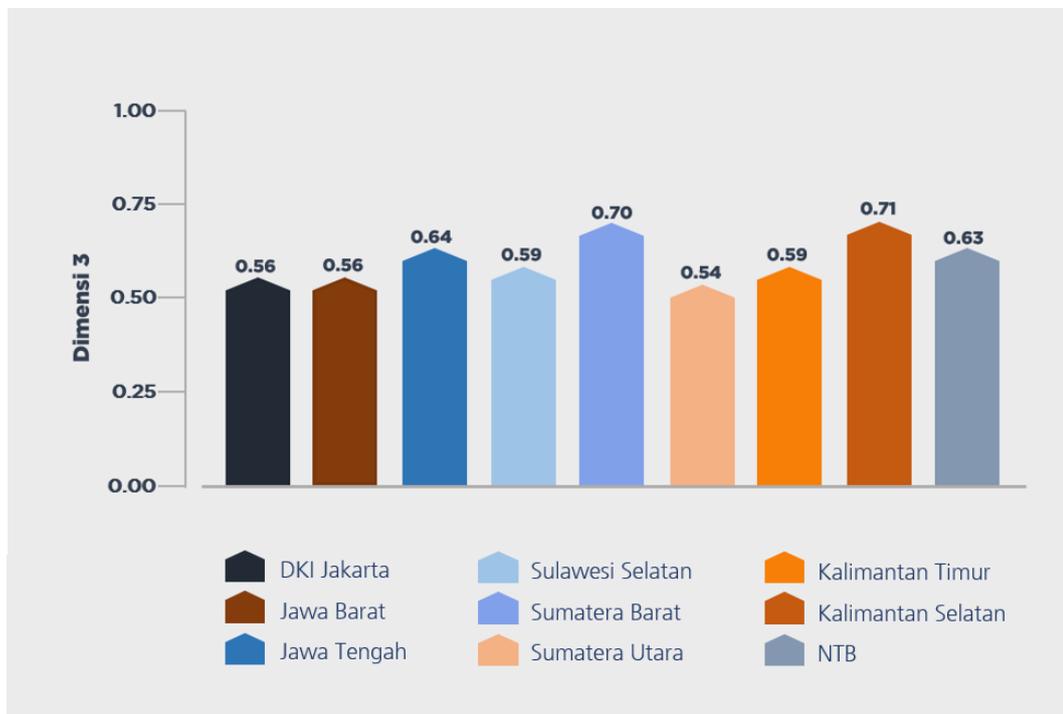
Pada dimensi pertama yaitu dimensi spiritual Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai tertinggi dengan nilai 0,75 yang masuk kategori baik dan Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai terendah di dimensi ini dengan nilai 0,59. Provinsi yang memiliki nilai tertinggi pada dimensi ini mengindikasikan bahwa secara umum kondisi spiritual di provinsi tersebut dalam hal habluminallah dan habluminannas, dukungan regulasi dan infrastruktur keagamaan berada dalam kategori baik.



Gambar 3.3 Nilai Dimensi Produktivitas IPZN

Sumber: Data di olah, 2021

Pada dimensi kedua yaitu dimensi produktivitas, provinsi yang mendapatkan skor tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta dengan nilai 0,87 dan masuk pada kategori sangat baik. Selanjutnya, provinsi yang mendapatkan skor terendah pada dimensi ini adalah provinsi NTB yang masuk pada kategori cukup baik. Provinsi Salah satu faktor yang menyebabkan provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi adalah karena Jakarta adalah Ibukota Indonesia dan merupakan pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Tingkat produktivitas yang tinggi di DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa budaya, daya saing, kualitas SDM, dan juga peran pemerintahan di DKI Jakarta ini saling mendukung untuk mewujudkan budaya produktivitas yang kuat.



Gambar 3.4 Nilai Dimensi Keadilan Ekonomi IPZN

Sumber: Data di olah, 2021

Nilai tertinggi pada dimensi keadilan ekonomi yang merupakan dimensi ketiga pada implementasi IPZN ini diraih oleh dua provinsi dengan masing-masing nilai 0,71, yaitu pada provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan dan masuk pada kategori baik. Nilai keadilan ekonomi terendah terdapat pada provinsi Sumatera Utara dengan nilai 0,54. Praktik ekonomi syariah merupakan salah satu variabel pada dimensi keadilan ekonomi ini dan dari hasil survey ini dapat kita lihat bahwa praktik ekonomi syariah pada provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan sudah baik, sehingga mendukung keadilan ekonomi dalam implementasi zakatnomics.



Gambar 3.5 Nilai Dimensi Institusi ZISWAF IPZN

Sumber: Data di olah, 2021

Pada dimensi terakhir yaitu institusi ZISWAF, Provinsi DKI Jakarta memiliki skor dimensi yang paling tinggi dengan nilai 0,84 yang masuk dalam kategori sangat Baik. Banyaknya kementerian, lembaga negara, serta perusahaan-perusahaan besar yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan pengumpulan dan penyaluran zakat sangat tinggi di Provinsi ini. Selain pengumpulan dan penyaluran zakat, di Provinsi DKI juga banyak terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga skor ketersediaan lembaga zakat menjadi tinggi. Sebaliknya jika melihat nilai literasi Zakat dan Wakaf, nilai literasi keduanya di Provinsi DKI Jakarta masih tergolong moderat sehingga perlu menjadi perhatian para OPZ untuk lebih meningkatkan kampanye zakat sehingga literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf dapat meningkat. Lebih lanjut, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki skor dimensi 4 terendah dengan nilai 0,68 yang masuk dalam kategori baik. Artinya, Pengumpulan dan penyaluran zakat, literasi zakat dan wakaf, serta ketersediaan UPZ di Provinsi ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan provinsi lainnya.



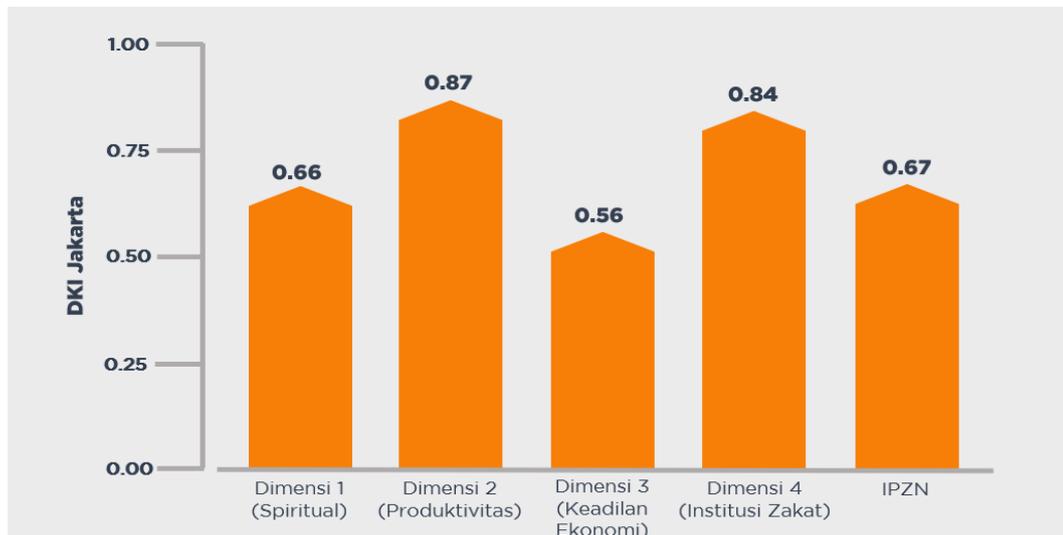
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

Provinsi DKI Jakarta

3.2 Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta sebanyak 10.562.088 jiwa. Persentase penduduk miskin di provinsi ini pada tahun 2020 sebesar 4,53%, sementara persentase pengangguran terbuka sebesar 10,95%. Jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2019. Peningkatan ini tentu tidak terlepas dari adanya Pandemi Covid-19 di Indonesia. Secara administratif, Provinsi DKI Jakarta terbagi ke dalam 6 kabupaten/kota, yaitu Kepulauan Seribu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara.

Di Provinsi DKI Jakarta banyak terdapat Lembaga Zakat dan Wakaf. Secara umum koordinator pengelolaan zakat di Provinsi DKI Jakarta adalah berada pada BAZNAS (BAZIS) DKI Jakarta dan pengelolaan wakaf berada pada BWI Jakarta. Selain BAZNAS Provinsi terdapat BAZNAS RI dan beberapa Lembaga Zakat Nasional (LAZNAS) yang berkedudukan di DKI Jakarta. Banyaknya lembaga zakat di Provinsi DKI Jakarta menjadikan pengumpulan ZISWAF di provinsi ini paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya.



Gambar 3.6 Nilai Dimensi IPZN Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Data di olah, 2021

Nilai Indeks Pembangunan Zakatonomics Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 adalah 0,67 dan masuk ke dalam kategori Baik. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi DKI Jakarta sudah baik.

Jika dilihat berdasarkan dimensi, nilai tertinggi diperoleh pada dimensi produktivitas, yaitu sebesar 0,87 atau masuk dalam kategori sangat baik. Indikator yang berkontribusi besar dalam pembentukan besarnya nilai dimensi produktivitas di Provinsi DKI Jakarta adalah inovasi dan kreativitas yang tinggi, kemiskinan yang rendah, tingginya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, tingginya rasio pertumbuhan ekonomi dibanding pertumbuhan populasi, tingginya Angka Partisipasi Murni (APM), visi misi yang mendukung produktivitas ekonomi, serta besarnya persentase penduduk yang mengakses BPJS. Meski demikian, pertumbuhan UMKM di Provinsi DKI Jakarta masih rendah.

Dimensi institusi zakat juga masuk ke dalam kategori sangat baik, dengan nilai 0,84. Beberapa indikator yang menopang tingginya nilai dimensi ini adalah besarnya pertumbuhan dana zakat yang berhasil dikumpulkan, tingginya nilai ACR, banyaknya jumlah UPZ di BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, besarnya persentase OPZ yang memiliki database mustahik, serta tingginya penyaluran dana ZIS. Sebaliknya, beberapa indikator yang masih cukup rendah adalah indeks literasi wakaf serta indeks literasi zakat.

Dimensi spiritual masuk ke dalam kategori baik dengan nilai 0,66. Indikator yang berkontribusi besar terhadap nilai dimensi spiritual di atas adalah tingginya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas Buang Air Besar (BAB), banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam non pesantren, serta banyaknya jumlah bantuan pemerintah ke lembaga zakat. Sementara itu, beberapa indikator yang nilainya masih rendah adalah rangking keamanan yang dilihat dari banyaknya kasus kriminal, jumlah masjid dan mushola, serta jumlah pesantren yang masih cukup sedikit,

Keadilan ekonomi merupakan dimensi dengan nilai paling rendah (0,56) atau masuk kategori cukup baik. Rendahnya angka pengangguran, tingginya literasi keuangan, serta tingginya rasio jumlah muzakki terhadap jumlah penduduk muslim memiliki nilai yang tinggi.

Sebaliknya beberapa indikator dengan nilai yang masih rendah adalah elastisitas PAD terhadap PDRB yang rendah, rasio jumlah pembiayaan bank syariah dibanding dengan bank konvensional yang masih rendah, serta rendahnya rasio DPK bank syariah terhadap DPK bank konvensional.

Secara umum nilai IPZN di Provinsi DKI Jakarta sudah baik, meski demikian beberapa hal masih perlu ditingkatkan. Pertama, angka kriminalitas DKI Jakarta masih sangat tinggi oleh karena itu perlu menjadi perhatian pihak-pihak terkait agar angka kriminalitas dapat ditekan. Kasus ini tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, namun perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas adalah suatu hal yang penting sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan lebih baik. Kedua, dukungan infrastruktur berupa kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan masjid, mushola dan pesantren perlu ditingkatkan karena jumlahnya belum seimbang dengan banyaknya penduduk Muslim di DKI Jakarta.

Ketiga, Pemerintah perlu memberikan perhatian lebih kepada sektor UMKM sehingga terjadi pertumbuhan yang signifikan, terlebih UMKM mampu menyerap lebih banyak jumlah tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Keempat, pihak-pihak terkait perlu mendorong agar praktik ekonomi syariah di DKI Jakarta dapat ditingkatkan, terutama perilaku menyimpan uang masyarakat pada perbankan syariah maupun akses terhadap pembiayaan perbankan syariah. Peran dari tokoh agama dan akademisi sangat dibutuhkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan praktik ekonomi syariah. Tentu saja, peran dari lembaga keuangan syariah dalam melakukan perbaikan dan peningkatan layanan juga tidak dapat diabaikan.



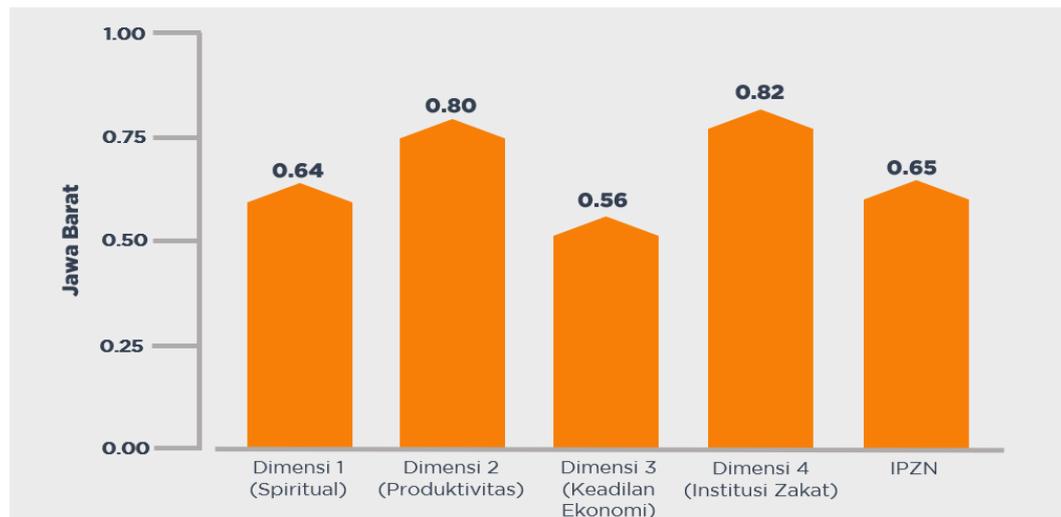
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

Provinsi Jawa Barat

3.3 Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat sebanyak 49.993.858 jiwa. Persentase penduduk miskin di Jawa Barat sekitar 7,88%. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka mencapai 10,46%. Adanya pandemic Covid-19 merupakan faktor utama yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan dan pengangguran di Provinsi Jawa Barat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara administrative, Provinsi Jawa Barat terdiri dari 18 kabupaten dan 9 kota.

Terdapat banyak lembaga Zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan lembaga wakaf di Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, secara umum koordinator pengelolaan zakat di Jawa Barat adalah berada pada BAZNAS (BAZIS) Provinsi Jawa Barat dan pengelolaan wakaf berada pada BWI Provinsi Jawa Barat. Selain BAZNAS pada level Provinsi, di Jawa Barat juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan LAZ dan Lembaga Wakaf, selain berkedudukan di tingkat provinsi, banyak LAZ dan Lembaga Wakaf yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2.7 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Jawa Barat

Sumber: Data di olah, 2021

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN) di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 0,65 atau masuk kategori baik. Secara umum, hasil ini menggambarkan bahwa kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Jawa Barat juga sudah baik.

Nilai tertinggi dari empat dimensi IPZN adalah pada dimensi institusi zakat yaitu 0,82 dengan kategori sangat baik. Indikator yang memiliki kontribusi besar dalam pembentukan dimensi institusi zakat adalah indeks literasi zakat yang cukup tinggi, ACR yang tinggi, banyaknya jumlah UPZ BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kota, banyaknya OPZ yang memiliki database mustahik, serta besarnya jumlah penyaluran ZIS. Meski demikian, indeks literasi wakaf dan pertumbuhan pengumpulan dana ZIS di provinsi ini masih cukup rendah.

Dimensi produktivitas juga memiliki nilai yang cukup tinggi, yaitu sebesar 0,80 dan masuk ke dalam kategori baik. Beberapa indikator yang berkontribusi terhadap tingginya nilai dimensi produktivitas adalah tingginya inovasi dan kreatifitas, rendahnya tingkat kemiskinan, tingginya rasio pertumbuhan ekonomi dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, tingginya tingkat Angka Partisipasi Murni, visi misi pemerintah daerah yang mendukung produktivitas ekonomi, serta indeks pembangunan desa yang cukup tinggi. Meski demikian, dari sisi budaya produktivitas, khususnya jumlah pengusaha dan pertumbuhan UMKM masih rendah.

Dimensi spiritual juga masuk ke dalam kategori baik, dengan nilai 0,64. Banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam, baik pesantren maupun non pesantren, serta banyaknya jumlah perda syariah merupakan tiga indikator utama yang memiliki kontribusi besar terhadap nilai dimensi spiritual.

Sebaliknya, peringkat keamanan dengan indikator angka kriminalitas, jumlah Masjid dan Mushola, serta nilai spiritual poverty line masih cukup rendah.

Mirip dengan Provinsi DKI Jakarta, dimensi keadilan ekonomi memiliki nilai yang paling rendah dibanding dengan dimensi yang lain, yaitu 0,56 atau masih dalam kategori cukup baik. Akses ekonomi, utamanya tingkat pengangguran terbuka yang rendah, tingkat inklusi keuangan yang tinggi, dan tingginya rasio jumlah muzakki terhadap jumlah penduduk Muslim memiliki kontribusi yang besar terhadap nilai dimensi ekonomi. Sementara itu, elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB, rasio jumlah pembiayaan syariah terhadap kredit perbankan konvensional dan rasio jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah terhadap DPK perbankan konvensional memiliki nilai yang rendah.

Secara keseluruhan nilai IPZN Provinsi Jawa Barat masuk dalam kategori baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Pertama, rendahnya indeks literasi wakaf dan pertumbuhan pengumpulan dana ZIS perlu menjadi perhatian pihak-pihak terkait. Jumlah penduduk yang banyak dengan mayoritas Muslim tentu menjadikan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan potensi dana zakat yang besar. Kedua, jumlah pengusaha dan UMKM di provinsi perlu ditingkatkan. Ketiga, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan angka kriminalitas yang tinggi. Oleh karena itu, perlu menjadi perhatian bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memahami penyebab kriminalitas, sehingga solusi atas permasalahan tersebut dapat dirumuskan dengan baik. Dukungan infrastruktur utamanya Masjid dan Mushola juga perlu diperhatikan mengingat jumlah penduduk Jawa Barat adalah yang terbesar serta wilayah administrasi yang luas. Keempat, praktik ekonomi syariah di provinsi ini juga masih cukup rendah, sehingga perlu kerja keras berbagai pihak untuk mendorong masyarakat dalam mengakses perbankan syariah, baik dari sisi *demand* (meminjam) maupun *supply* (melakukan simpanan).



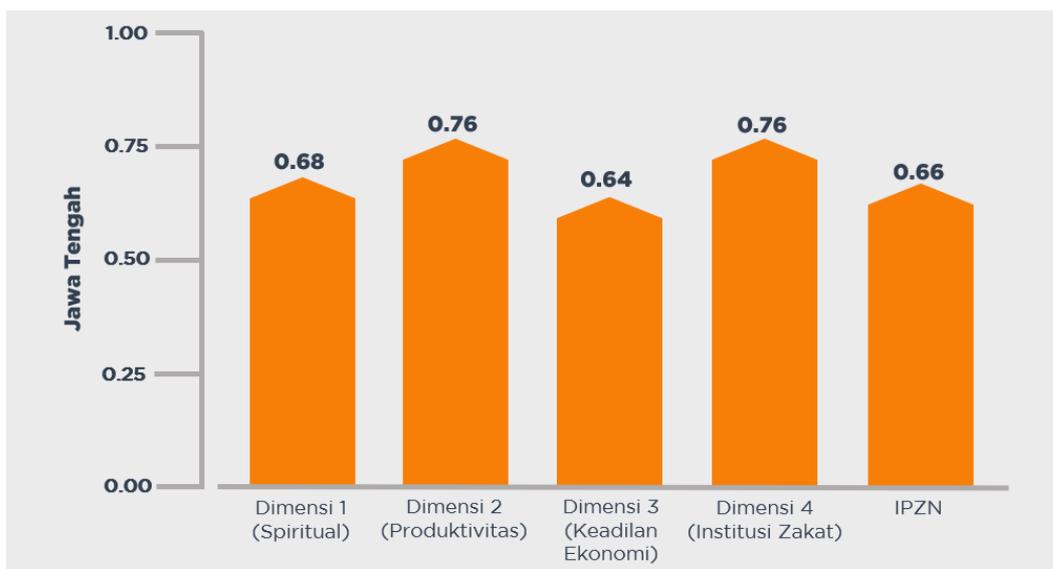
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

Provinsi Jawa Tengah

3.4 Provinsi Jawa Tengah

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tahun 2020, jumlah penduduk provinsi ini mencapai 36.516.035 jiwa. Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 tergolong masih cukup tinggi, yaitu sebesar 11,84% dan sedikit mengalami penurunan menjadi 11,79%. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka sebanyak 6,48%. Dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka pada tahun 2020 mengalami peningkatan, sebagai dampak dari adanya pandemic Covid-19. Secara administratif, terdapat sebanyak 29 kabupaten dan 6 kota di Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai salah satu provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota yang banyak, maka di Provinsi ini terdapat banyak lembaga Zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta lembaga wakaf. Meski demikian, secara umum pengelolaan dana zakat di di Provinsi Jawa Tengah berada di bawah koordinator BAZNAS (BAZIS) Provinsi Jawa Tengah dan pengelolaan wakaf berada pada BWI Provinsi Jawa Tengah. Selain BAZNAS pada level Provinsi, di Jawa Tengah juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan LAZ dan Lembaga Wakaf, selain berkedudukan di tingkat provinsi, banyak LAZ dan Lembaga Wakaf yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Tengah.



Gambar 3.8 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Data di olah, 2021

Pada tahun 2021, nilai Indeks Pembangunan Zakatnomics (IPZN) Provinsi Jawa Tengah adalah 0,66 dan masuk dalam kategori baik. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Jawa Tengah juga sudah baik, sebagaimana dua provinsi sebelumnya.

Jika dilihat berdasarkan dimensi, seluruh dimensi atau empat dimensi masuk ke dalam kategori baik, meskipun dengan nilai yang berbeda-beda. Nilai dimensi produktivitas dan dimensi institusi zakat adalah yang tertinggi dan keduanya memiliki nilai yang sama, yaitu 0,76. Beberapa indikator yang berkontribusi terhadap tingginya nilai pada dimensi produktivitas adalah tingginya inovasi dan kreatifitas di Provinsi Jawa Tengah, tingginya rasio pertumbuhan ekonomi dibanding dengan pertumbuhan penduduk, tingginya Angka Partisipasi Murni, visi misi pemerintah daerah yang mendukung produktivitas ekonomi, serta jumlah penduduk miskin yang tergolong cukup

rendah dan indeks pembangunan desa yang cukup tinggi. Sebaliknya, rasio pengusaha Muslim terhadap jumlah penduduk Muslim dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Tengah masih rendah.

Sementara itu, beberapa indikator yang mendukung tingginya nilai dimensi institusi zakat adalah tingginya nilai ACR, banyaknya jumlah UPZ BAZNAS baik ditingkat provinsi maupun kabupaten, tingginya persentase OPZ yang memiliki database mustahik, serta tingginya indeks literasi zakat. Sebaliknya, beberapa indikator seperti indeks literasi wakaf, pertumbuhan pengumpulan dana ZIS, serta jumlah penyaluran ZIS di Provinsi Jawa Tengah masih cukup rendah.

Dimensi spiritual memiliki nilai terbesar ketiga yaitu 0,68. Besarnya nilai tersebut ditopang oleh banyaknya persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar (BAB) sendiri, banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam baik pesantren maupun non pesantren, banyaknya jumlah perda syariah yang dimiliki, serta tingginya indeks kebahagiaan masyarakat Jawa Tengah. Sebaliknya, beberapa variabel yang masih memiliki nilai rendah adalah rasio jumlah masjid dan mushola terhadap jumlah penduduk Muslim, angka kriminalitas yang masih cukup tinggi, serta tingkat pemurtadan di Jawa Tengah yang masih tinggi.

Terakhir, dimensi keadilan ekonomi memiliki nilai sebesar 0,64. Beberapa indikator yang berkontribusi terhadap besaran nilai dimensi keadilan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah adalah tingginya elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap PDRB, rendahnya angka pengangguran, serta tingginya tingkat literasi keuangan di Provinsi Jawa Tengah. Sementara itu, beberapa indikator lain seperti rasio pembiayaan di perbankan syariah dibanding dengan kredit perbankan konvensional serta rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah terhadap DPK perbankan konvensional masih rendah.

Secara umum nilai IPZN di Provinsi Jawa Tengah sudah baik, meski demikian beberapa hal masih perlu ditingkatkan. Pertama, rasio pengusaha Muslim masih rendah sehingga pihak terkait perlu mendorong munculnya pengusaha-pengusaha Muslim, seperti menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk peran dari lembaga zakat. Kedua, pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Tengah juga masih rendah. Hal ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah karena UMKM mampu menyerap lebih banyak jumlah tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Terkait dengan kedua hal di atas, pemerintah dan lembaga zakat dapat saling bersinergi.

Ketiga, terkait dengan dimensi institusi zakat masih terdapat tiga indikator yang perlu didorong yaitu indeks literasi wakaf, pertumbuhan pengumpulan dana ZIS, serta jumlah penyaluran ZIS. Dalam meningkatkan literasi wakaf peran dari tokoh agama dan akademisi menjadi sangat penting. Berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah penduduk yang banyak tentu memiliki potensi yang besar, oleh karena itu kesadaran untuk menyalurkan dana ZIS melalui lembaga zakat perlu ditingkatkan. Keempat, dukungan infrastruktur khususnya jumlah Masjid dan Mushola perlu ditingkatkan karena rasio terhadap jumlah penduduk Muslim masih rendah.

Kelima, masih rendahnya praktik ekonomi syariah di Provinsi Jawa Tengah perlu menjadi perhatian yang serius, terutama perilaku menyimpan uang (menabung) masyarakat pada perbankan syariah maupun akses terhadap pembiayaan perbankan syariah. Peran dari tokoh agama dan akademisi sangat dibutuhkan untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dengan praktik ekonomi syariah. Meski demikian peran dari lembaga keuangan syariah dalam melakukan perbaikan dan peningkatan layanan juga merupakan suatu keharusan, agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah meningkat.



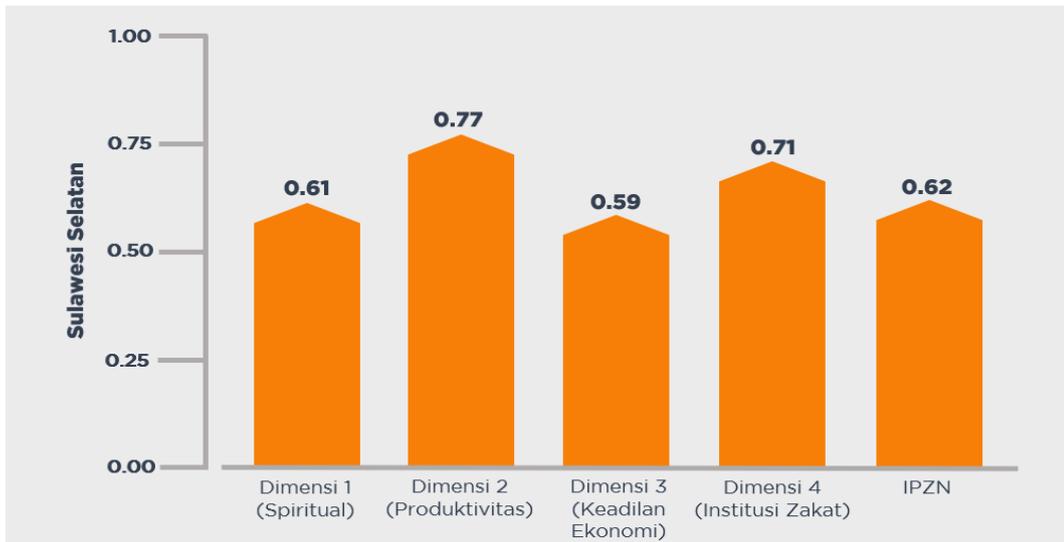
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

Provinsi Sulawesi Selatan

3.5 Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 adalah sebanyak 8.928.004 jiwa. Persentase penduduk miskin di provinsi ini pada tahun 2020 mencapai 8,99%. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka sebesar 6,31%. Sebagaimana provinsi lainya, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Secara administrative, Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota.

Terdapat banyak lembaga Zakat dan wakaf di Provinsi Sulawesi Selatan, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Koordinator pengelolaan zakat di Sulawesi Selatan dilakukan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi Sulawesi Selatan demikian halnya dengan pengelolaan wakaf berada pada BWI Provinsi Sulawesi Selatan. Selain BAZNAS pada level Provinsi, di Sulawesi Selatan juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan LAZ dan Lembaga Wakaf, selain berkedudukan di tingkat provinsi, banyak LAZ dan Lembaga Wakaf yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 3.9 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Sulawesi Selatan

Sumber: Data di olah, 2021

Pada tahun 2021, nilai Indeks Pembangunan Zakatnomics Provinsi Sulawesi Selatan adalah 0,62 atau masuk dalam kategori baik. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Sulawesi Selatan sudah baik.

Berdasarkan dimensi, nilai tertinggi diperoleh dimensi produktivitas, yaitu 0,77 dan masuk dalam kategori baik. Beberapa indikator yang memiliki kontribusi yang signifikan dalam besaran nilai dimensi produktivitas ini adalah tingginya inovasi dan kreativitas, rendahnya angka kemiskinan, besarnya pertumbuhan PAD, tingginya rasio pertumbuhan ekonomi dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, serta adanya visi dan misi pemerintah daerah yang mendukung produktivitas ekonomi. Meski demikian, beberapa indikator lain masih memiliki nilai yang rendah seperti jumlah pengusaha Muslim yang masih sedikit, serta pertumbuhan UMKM yang masih rendah.

Dimensi kedua yang mendapatkan nilai yang cukup tinggi adalah dimensi institusi zakat, yaitu 0,71 atau dalam kategori baik. Nilai ACR yang tinggi, banyaknya jumlah UPZ di BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten, serta besarnya persentase OPZ yang memiliki database mustahik berkontribusi besar dalam pembentukan nilai dimensi institusi zakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, indeks literasi zakat, indeks literasi wakaf, pengumpulan dana ZIS, dan jumlah penyaluran dana ZIS memiliki nilai yang masih cukup rendah.

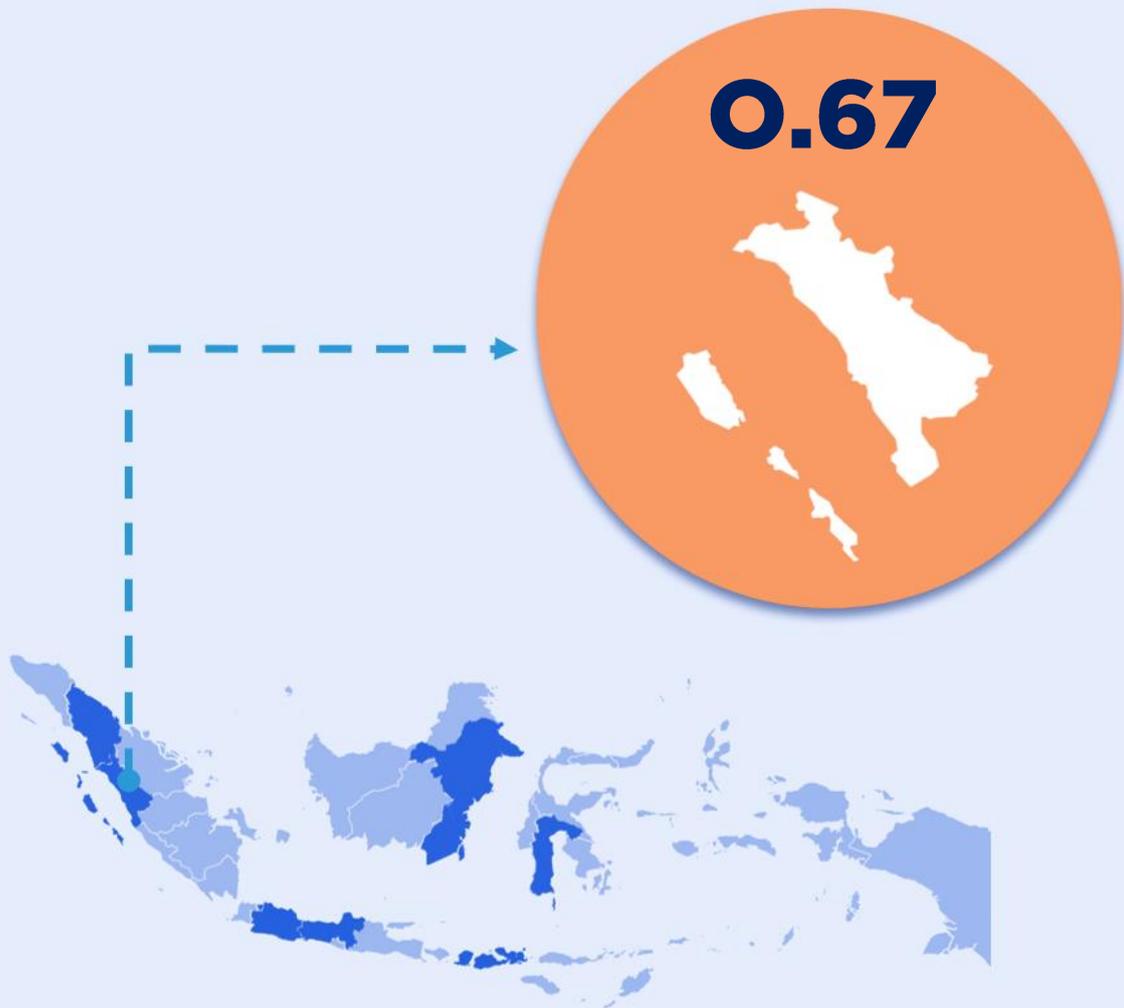
Dimensi spiritual mendapatkan nilai sebesar 0,61 dan masuk dalam kategori baik. Beberapa indikator yang berkontribusi dalam besaran nilai dimensi spiritual di Provinsi Sulawesi Selatan adalah banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, banyaknya jumlah lembaga pendidikan Islam non pesantren, serta banyaknya perda syariah yang ada di Sulawesi Selatan. Sebaliknya, indikator yang memiliki nilai rendah adalah tingkat keamanan, jumlah Masjid dan Mushola, spiritual poverty line, serta tingginya tingkat rawan pemurtadan.

Terakhir, dimensi keadilan ekonomi memiliki nilai yang paling rendah, yaitu 0,59 atau dalam kategori cukup baik. Rendahnya tingkat pengangguran, tingginya literasi keuangan, serta tingginya rasio jumlah muzakki terhadap jumlah penduduk Muslim merupakan indikator yang membentuk nilai dimensi

keadilan ekonomi. Sebaliknya, elastisitas PAD terhadap PDRB, rasio jumlah pembiayaan syariah terhadap perbankan konvensional, serta rasio DPK perbankan syariah terhadap DPK perbankan konvensional masih rendah.

Secara keseluruhan nilai IPZN Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Pertama, jumlah pengusaha Muslim di Provinsi Sulawesi Selatan masih rendah sehingga pihak terkait perlu mendorong munculnya pengusaha-pengusaha Muslim, seperti menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kedua, pertumbuhan UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan juga masih rendah. Hal ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah karena UMKM mampu menyerap lebih banyak jumlah tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Terkait dengan kedua hal di atas, pemerintah dan lembaga zakat dapat saling bersinergi untuk dapat mendorong peningkatan jumlah pengusaha Muslim dan pertumbuhan UMKM yang signifikan.

Ketiga, rendahnya indeks literasi baik zakat maupun wakaf serta masih rendahnya pertumbuhan pengumpulan dan jumlah dana ZIS yang disalurkan perlu menjadi perhatian berbagai pihak. Peran tokoh agama dan akademisi dalam meningkatkan literasi zakat dan wakaf menjadi sangat penting. Sementara itu, berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana ZIS di Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan, termasuk melakukan edukasi terkait dengan pentingnya menyalurkan ZIS melalui lembaga zakat. Keempat, tingginya angka kriminalitas di Sulawesi Selatan masih tinggi, untuk itu memahami faktor-faktor yang menyebabkan baik sosial-maupun ekonomi penting untuk dilakukan agar tindakan pencegahan yang tepat dapat dilakukan. Terakhir, praktik ekonomi syariah di provinsi ini juga masih cukup rendah, sehingga perlu kerja keras berbagai pihak untuk mendorong masyarakat dalam mengakses perbankan syariah, baik dari sisi demand (meminjam) maupun supply (melakukan simpanan).



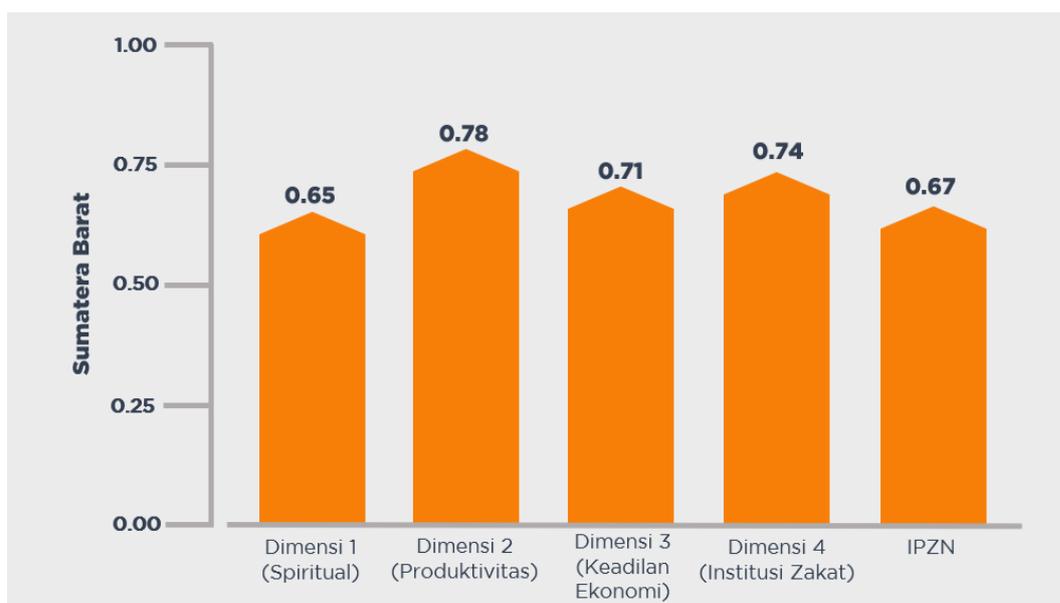
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

Provinsi Sumatera Barat

3.6 Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2020, jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebanyak 5.534.472 jiwa. Persentase penduduk miskin di Sumatera Barat pada tahun 2020 sekitar 6,56% dan sedikit meningkat menjadi 6,63% pada tahun 2021. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka pada tahun 2020 di provinsi ini mencapai 6,88% dan mengalami penurunan menjadi 6,525 pada tahun 2021. Persentase jumlah penduduk miskin dan pengangguran pada tahun 2020 mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2019, hal ini sebagai dampak dari pandemic Covid-19 yang melanda berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Barat. Secara administrative, Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota.

Banyak lembaga zakat dan wakaf yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Berkaitan dengan dana zakat, secara umum pengelolaan dana zakat di Provinsi Sumatera Barat berada di bawah koordinator BAZNAS (BAZIS) Provinsi Sumatera Barat dan pengelolaan wakaf berada pada BWI Provinsi Sumatera Barat. Selain BAZNAS pada level Provinsi, di Sumatera Barat juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan LAZ dan Lembaga Wakaf, selain berkedudukan di tingkat provinsi, banyak LAZ dan Lembaga Wakaf yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.



Gambar 3.10 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Sumatera Barat

Sumber: Data di olah, 2021

Hasil perhitungan Indeks Pembangunan Zakatnomics di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 adalah sebesar 0,67 atau masuk dalam kategori baik. Temuan ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Sumatera Barat sudah baik.

Jika dilihat berdasarkan masing-masing dimensi, dimensi produktivitas memiliki nilai paling tinggi yaitu 0,78 atau masuk kategori baik. Beberapa indikator yang memiliki nilai yang menopang besaran nilai tersebut adalah tingginya inovasi dan kreatifitas, rendahnya angka kemiskinan, tingginya rasio pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan jumlah penduduk, serta adanya visi misi yang mendukung produktivitas ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Meski demikian, jumlah pengusaha Muslim dan pertumbuhan UMKM di Provinsi Sumatera Barat masih rendah.

Berikutnya, nilai dimensi institusi zakat sebesar 0,74 atau masuk kategori baik. Besaran nilai ini didorong oleh banyaknya jumlah UPZ BAZNAS baik level provinsi maupun kabupaten/kota, persentase OPZ yang memiliki database mustahik, termasuk indeks literasi zakat dan ACR yang cukup tinggi. Sementara itu, indeks literasi wakaf, pengumpulan dana ZIS, serta jumlah penyaluran ZIS masih cukup rendah.

Dimensi keadilan ekonomi memiliki nilai sebesar sebesar 0,71 dan masuk dalam kategori baik. Besaran nilai ini didukung oleh tingginya elastisitas PAD terhadap PDRB, rendahnya tingkat pengangguran, banyaknya jumlah muzakki, serta tingginya tingkat literasi keuangan di Sumatera Barat. Tidak jauh berbeda dengan provinsi yang lain, praktik ekonomi syariah khususnya rendahnya rasio pembiayaan di perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional, serta rendahnya rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional.

Terakhir, nilai dimensi spiritual adalah sebesar 0,65 atau termasuk dalam kategori cukup baik. Besaran nilai dimensi spiritual paling banyak dipengaruhi oleh banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, tingginya indeks kebahagiaan, banyaknya jenis perda syariah yang dimiliki oleh Provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Barat jumlah Masjid dan Mushola masih sedikit, termasuk nilai spiritual poverty line yang rendah, potensi rawan pemurtadan yang cukup tinggi, serta angka kriminalitas yang juga cukup tinggi.

Secara umum nilai IPZN Provinsi Sumatera Barat masuk dalam kategori baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Pertama, pihak-pihak terkait perlu mendorong agar jumlah pengusaha Muslim di Provinsi Sumatera Barat meningkat, diantaranya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Kedua, UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang signifikan serta menjadi salah satu penopang perekonomian Indonesia, oleh karena itu upaya-upaya untuk menumbuhkan UMKM perlu ditingkatkan. Berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah pengusaha Muslim dan

menumbuhkan UMK pemerintah bersama-sama dengan lembaga zakat dapat saling bersinergi.

Ketiga, indeks literasi wakaf, penghimpunan dan penyaluran dana ZIS masih belum optimal. Keterlibatan tokoh agama dan akademisi dalam meningkatkan literasi wakaf di Sumatera Barat memiliki peran yang sangat penting. Sementara itu, berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah penghimpunan dana ZIS di Sumatera Barat perlu ditingkatkan, termasuk melakukan edukasi terkait dengan pentingnya menyalurkan ZIS melalui lembaga zakat. Keempat, perlu upaya yang serius untuk meningkatkan praktik ekonomi syariah di Sumatera Barat, baik dari lembaga keuangan, pemerintah maupun masyarakat. Kelima, rasio jumlah Masjid dan Mushola dengan jumlah penduduk Muslim masih rendah sehingga dukungan infrastruktur perlu ditingkatkan.



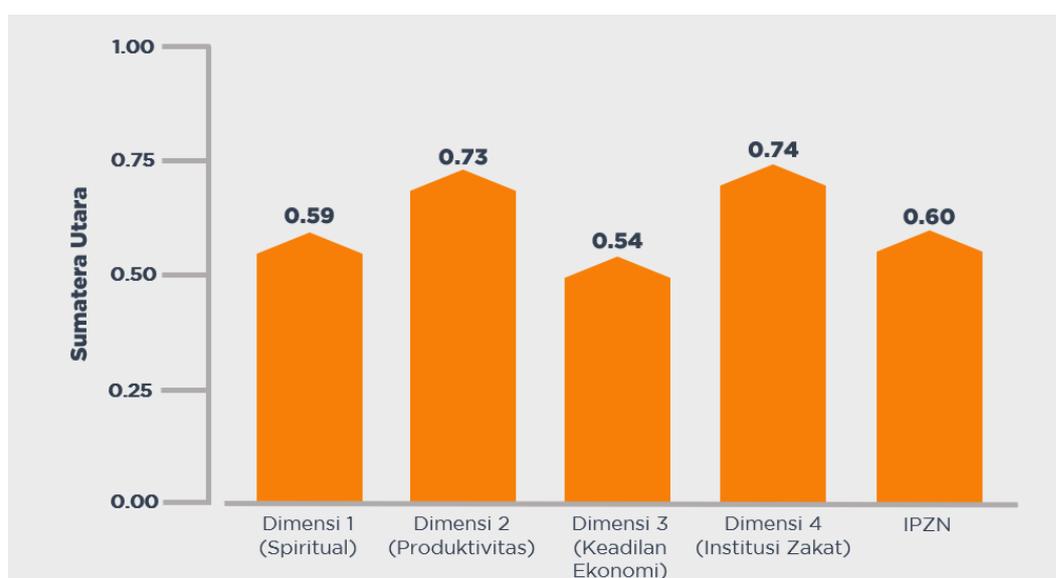
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

Provinsi Sumatera Utara

3.7 Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 mencapai 14.799.361 jiwa. Dengan demikian, Sumatera Utara menjadi provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di pulau Sumatera. Persentase jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2020 sebanyak 9,14%. Sementara itu, pengangguran terbuka di provinsi ini mencapai 6,91%. Secara administrative, Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 33 kabupaten/kota.

Terdapat banyak lembaga Zakat dan wakaf di Provinsi Sumatera Utara. Meski demikian, koordinator pengelolaan zakat di Sulawesi Selatan dilakukan oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi Sumatera Utara, sedangkan pengelolaan wakaf dilakukan oleh BWI Provinsi Sumatera Utara. Selain BAZNAS pada level Provinsi, di Sumatera Utara juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan LAZ dan Lembaga Wakaf, selain berada di tingkat provinsi, banyak LAZ dan Lembaga Wakaf yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3.11 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Sumatera Utara

Sumber: Data di olah, 2021

Hasil pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 adalah sebesar 0,60 atau masuk dalam kategori cukup baik. Hasil ini menempatkan Sumatera Utara menjadi provinsi dengan nilai IPZN terendah dibanding 8 provinsi lainnya. Kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan sudah cukup baik.

Dimensi institusi zakat di provinsi Sumatera Utara memiliki nilai yang paling tinggi dibandingkan dengan tiga dimensi lainnya, yaitu 0,74 atau masuk dalam kategori baik. Besarnya nilai ACR, banyaknya jumlah UPZ Baznas provinsi maupun kabupaten, serta tingginya indeks literasi zakat dan besarnya persentase OPZ yang memiliki database mustahik menopang besaran nilai dimensi institusi zakat. Meski demikian, beberapa indikator lain masih memiliki nilai yang cukup rendah, seperti indeks literasi wakaf, pengumpulan dana ZIS, serta jumlah penyaluran dana ZIS.

Dimensi kedua yang memiliki nilai yang cukup tinggi adalah dimensi produktivitas yaitu 0,73 atau masuk dalam kategori baik. Beberapa indikator yang mendukung besaran nilai dimensi produktivitas adalah tingginya inovasi dan kreatifitas, rendahnya angka kemiskinan, tingginya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, besarnya rasio pertumbuhan ekonomi dibanding dengan pertumbuhan populasi, serta tingginya Angka Partisipasi Murni. Sebaliknya, jumlah pengusaha Muslim dan pertumbuhan UMKM di Sumatera Utara masih rendah.

Berikutnya, nilai dimensi spiritual mendapatkan nilai sebesar 0,59 atau masuk kategori cukup baik. Besaran nilai ini didukung oleh banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, banyaknya lembaga pendidikan Islam non pesantren di Provinsi Sumatera Utara, serta banyaknya jenis perda syariah yang dimiliki. Sementara itu, beberapa indikator lain masih

mendapatkan nilai yang rendah seperti tingginya angka kriminalitas, jumlah Masjid dan Mushola yang masih sedikit, serta sedikitnya jumlah pesantren di Sumatera Utara.

Terakhir, dimensi keadilan ekonomi mendapatkan nilai yang paling rendah, yaitu 0,54 dan masuk dalam kategori cukup baik. Rendahnya angka pengangguran dan tingginya tingkat literasi keuangan di Provinsi Sumatera Utara menopang besaran nilai keadilan ekonomi. Sebaliknya, indikator seperti elastisitas PAD terhadap PDRB, rasio pembiayaan perbankan syariah dibanding perbankan konvensional, serta rasio Dana Pihak Ketiga perbankan syariah terhadap perbankan konvensional masih memiliki skor yang rendah.

Nilai IPZN Provinsi Sumatera Utara masih dalam kategori cukup baik, sehingga banyak indikator yang masih perlu untuk ditingkatkan. Pertama, terkait dengan dimensi institusi zakat terdapat tiga indikator yang perlu menjadi perhatian yaitu indeks literasi wakaf, pertumbuhan pengumpulan dana ZIS, serta jumlah penyaluran ZIS. Peran tokoh agama dan akademisi di dalam meningkatkan literasi wakaf sangat diperlukan. Sementara itu, terkait dengan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS, lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ perlu melakukan terobosan baru agar terjadi peningkatan yang signifikan.

Kedua, pihak-pihak terkait perlu mendorong agar jumlah pengusaha Muslim di Provinsi Sumatera Utara meningkat, diantaranya dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Ketiga, UMKM mampu menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak serta menjadi salah satu penopang perekonomian nasional, oleh karena itu upaya-upaya untuk menumbuhkan UMKM perlu ditingkatkan. Dalam upaya meningkatkan jumlah pengusaha Muslim dan menumbuhkan UMK pemerintah bersama-sama dengan lembaga zakat dapat saling bersinergi.

Keempat, angka kriminalitas di Sumatera Utara masih tinggi oleh karena itu perlu mendapatkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Kasus ini tentu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, namun perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya tindakan kriminalitas adalah suatu hal yang penting sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan lebih baik. Kelima, perlu dukungan infrastruktur baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil terkait dengan jumlah Masjid atau Mushola, serta pesantren di Sumatera Utara. Keenam, praktik ekonomi syariah di Sumatera Utara juga masih rendah, oleh karena itu perlu upaya konkrit untuk meningkatkan, baik dari lembaga keuangan, pemerintah maupun masyarakat sipil.



Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

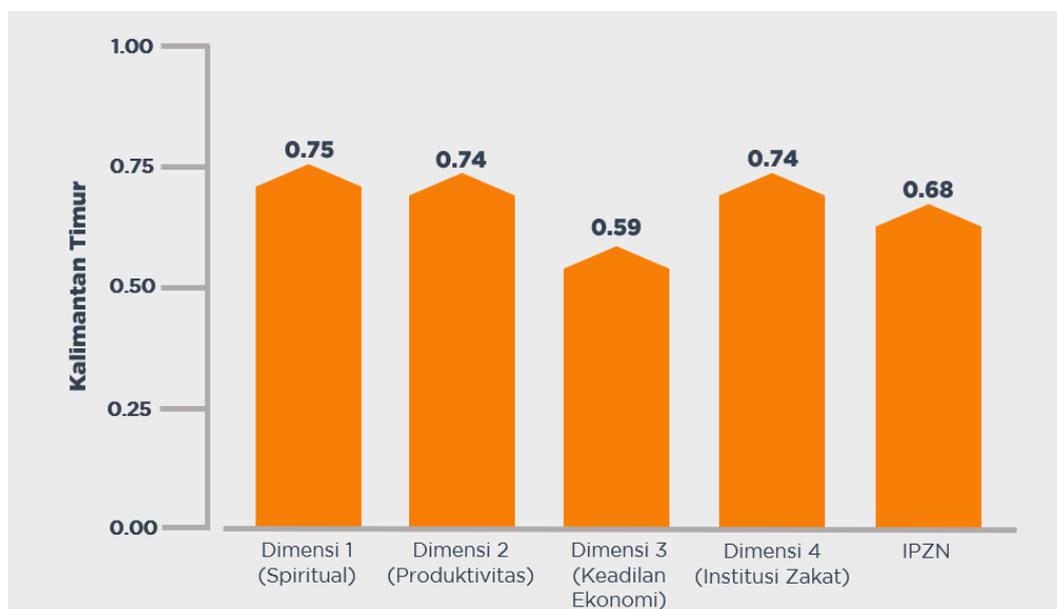
Provinsi Kalimantan Timur

3.8 Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Timur adalah sebanyak 3.766.039 jiwa. Persentase penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2020 adalah 6,64% dan sedikit mengalami penurunan menjadi 6,54% pada tahun 2021. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka di tahun 2020 mencapai 6,87% . Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan dibanding tahun 2019, sebaigaimana provinsi yang lain. Secara administrative, Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 10 kabupaten atau kota.

Sebagaimana provinsi yang lain, di Kalimantan Selatan juga terdapat banyak lembaga zakat dan lembaga wakaf. Pengelolaan dana zakat, secara umum berada di bawah koordinator BAZNAS (BAZIS) Provinsi Kalimantan Timur. Sementara itu pengelolaan wakaf berada pada BWI Provinsi Kalimantan Timur. Selain BAZNAS pada level Provinsi, di Kalimantan Timur juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten atau kota. Lembaga Amil Zakat dan lembaga wakaf juga tersebar di tingkat kabupaten atau kota, selain di level provinsi.

Pada tahun 2021, hasil perhitungan Indeks Pembangunan Zakatnomics di Provinsi Kalimantan Timur adalah 0,68 dan masuk dalam kategori baik. Nilai IPZN Provinsi Kalimantan Timur adalah yang tertinggi, jika dibanding dengan 8 provinsi lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Kalimantan Timur sudah baik.



Gambar 3.12 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: Data di olah, 2021

Di Provinsi Kalimantan Timur, dimensi spiritual mendapatkan nilai yang paling tinggi, yaitu 0,75 dengan kategori baik. Besaran nilai dimensi spiritual ini didukung oleh persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar, banyaknya lembaga pendidikan Islam non pesantren, dan banyaknya jenis perda syariah yang dimiliki Kalimantan Timur. Sementara itu, jumlah masjid dan mushola di Provinsi Kalimantan Timur masih sedikit dan juga potensi rawan pemurtadan masih cukup tinggi.

Dimensi produktivitas dan dimensi institusi zakat memiliki nilai yang sama, yaitu 0,74 oleh karena itu keduanya masuk ke dalam kategori baik. Besarnya nilai dimensi produktivitas didukung oleh rendahnya tingkat kemiskinan, besarnya pertumbuhan UMKM, tingginya rasio pertumbuhan ekonomi dibanding pertumbuhan penduduk, tingginya tingkat APM, serta adanya visi misi yang mendukung produktivitas ekonomi. Sebaliknya beberapa indikator seperti inovasi dan kreativitas, jumlah pengusaha, dan pertumbuhan PAD masih nilainya masih rendah.

Dimensi institusi zakat yang mendapatkan nilai 0,74 didukung oleh banyaknya jumlah UPZ di BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kota, serta banyaknya persentase OPZ yang memiliki database mustahik, termasuk juga tingginya indeks literasi zakat, dan besarnya nilai ACR. Sementara itu, indikator yang nilainya masih cukup rendah adalah indeks literasi wakaf, pertumbuhan dana ZIS, serta pertumbuhan penyaluran dana ZIS.

Terakhir, dimensi keadilan ekonomi mendapatkan nilai 0,59 sehingga kategori ini masuk ke dalam kategori cukup baik. Nilai dimensi keadilan ekonomi ini adalah yang paling rendah dibanding dengan tiga dimensi lainnya. Besaran nilai dimensi ini didukung oleh rendahnya tingkat pengangguran, tingginya literasi keuangan, banyaknya muzakki di Provinsi Kalimantan Timur. Indikator yang memiliki nilai yang masih rendah pada dimensi ini adalah elastisitas PAD terhadap PDRB, rasio pembiayaan perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional, serta rasio Dana Pihak Ketiga perbankan syariah dibanding dengan DPK perbankan konvensional.

Meskipun nilai IPZN Provinsi Kalimantan Timur adalah yang tertinggi, dibanding dengan 8 provinsi lainnya, namun beberapa indikator masih tetap perlu ditingkatkan. Pertama, rasio Masjid dan Mushola terhadap jumlah penduduk Muslim di Provinsi Kalimantan Timur rendah, untuk itu diperlukan dukungan infrastruktur agar proporsional. Kedua, inovasi dan kreativitas di provinsi ini juga masih rendah, oleh karena itu pihak terkait perlu mengupayakan adanya peningkatan inovasi dan kreativitas. Ketiga, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat sipil –termasuk lembaga zakat– diharapkan dapat bersinergi untuk mendorong peningkatan jumlah pengusaha Muslim. Keempat, Pemerintah perlu melakukan terobosan agar Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Kelima, tingkat literasi wakaf dan penghimpunan dana juga perlu mendapatkan perhatian lebih dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat, terutama tokoh agama dan akademisi. Keenam, sebagaimana di provinsi yang lain, praktik ekonomi syariah di Kalimantan Timur juga masih rendah, untuk itu keterlibatan tokoh masyarakat dan akademisi menjadi vital di dalam mengedukasi masyarakat, selain peran sentral dari lembaga keuangan untuk terus melakukan perbaikan dan terobosan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam semakin meningkat.



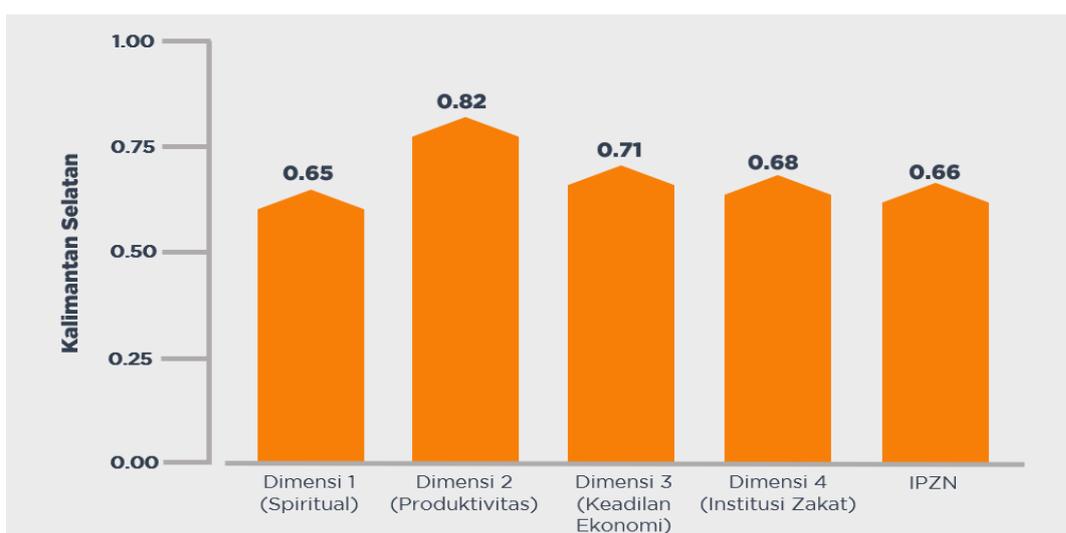
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

Provinsi Kalimantan Selatan

3.9 Provinsi Kalimantan Selatan

Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sebanyak 4.303.979. Persentase penduduk miskin di tahun 2020 sebesar 4,38% dan sedikit meningkat menjadi 4,83% pada tahun 2021. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,74% dan sedikit mengalami peningkatan menjadi 4,95% di tahun 2021. Secara administrative, Provinsi Kalimantan Selatan terbagi ke dalam 13 kabupaten atau kota.

Terdapat banyak lembaga Zakat dan wakaf di Provinsi Kalimantan Selatan, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dalam hal pengelolaan dana zakat di Provinsi Kalimantan Selatan dikoordinir oleh BAZNAS (BAZIS) Provinsi, demikian halnya dengan pengelolaan wakaf berada pada BWI Provinsi Kalimantan Selatan. Selain BAZNAS pada level Provinsi, di Kalimantan Selatan juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Wakaf, selain berada di tingkat provinsi, banyak LAZ dan Lembaga Wakaf yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 3.13 Nilai Dimensi IPZN Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Data di oleh, 2021

Nilai Indeks Pembangunan Zakatnomics Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 adalah 0,66 atau masuk dalam kategori baik. Dengan kata lain, secara keseluruhan kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Kalimantan Timur sudah baik.

Jika dilihat berdasarkan dimensi, nilai tertinggi diperoleh pada dimensi produktivitas dengan nilai 0,82 dengan kata lain masuk dalam kategori sangat baik. Besaran nilai ini didukung oleh tingginya inovasi dan kreativitas, rendahnya tingkat kemiskinan, tingginya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, tingginya rasio pertumbuhan ekonomi dibanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk, serta adanya visi misi yang mendukung produktivitas ekonomi. Sementara itu, indikator pada dimensi produktivitas yang masih memiliki nilai rendah adalah jumlah pengusaha dan pertumbuhan UMKM.

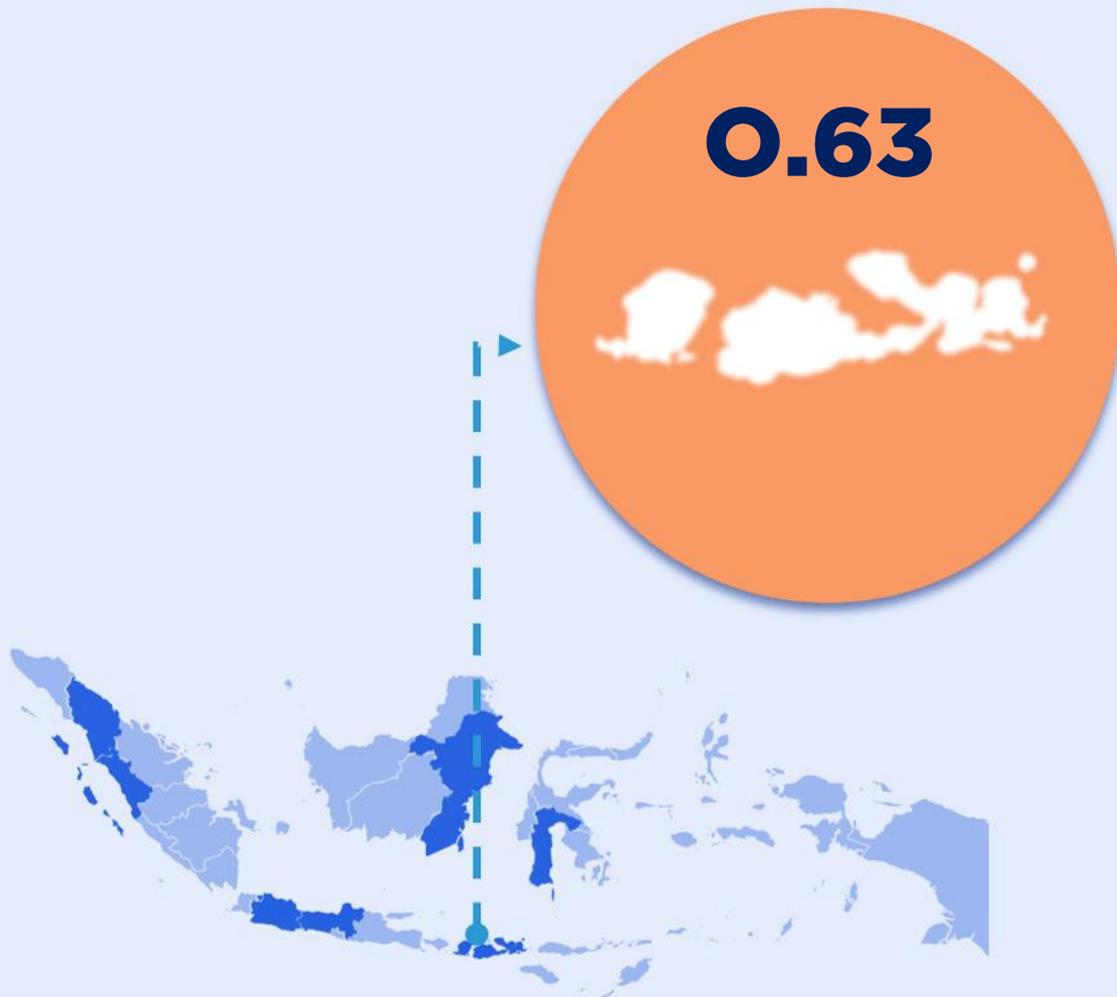
Berikutnya, dimensi keadilan ekonomi mendapatkan nilai 0,71 dan masuk dalam kategori baik. Besaran nilai ini didukung oleh tingginya elastisitas PAD terhadap PDRB, rendahnya tingkat pengangguran, serta banyaknya jumlah muzakki di Kalimantan Selatan. Beberapa indikator yang masih memiliki rendah adalah praktik ekonomi syariah, khususnya pembiayaan perbankan syariah dan Dana Pihak Ketiga perbankan syariah.

Dimensi institusi zakat di Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan nilai 0,68 atau masuk dalam kategori baik. Beberapa indikator pada dimensi ini yang mendapatkan nilai tinggi adalah jumlah UPZ di BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten Kota, serta banyaknya OPZ yang memiliki database mustahik. Sebaliknya beberapa indikator yang masih mendapatkan nilai rendah adalah jumlah penyaluran ZIS, pengumpulan dana ZIS serta indeks literasi wakaf.

Terakhir, dimensi spiritual mendapatkan nilai 0,65 dan masuk dalam kategori baik. Beberapa indikator yang mendapatkan nilai tinggi pada dimensi ini adalah persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, banyaknya jumlah pesantren, serta banyaknya jenis perda syariah yang dimiliki Provinsi Kalimantan Selatan. Sebaliknya beberapa indikator yang mendapatkan nilai rendah adalah jumlah Masjid dan Mushola, spiritual poverty line, dan potensi rawan pemurtadan.

Secara umum nilai IPZN di Provinsi Kalimantan Selatan sudah baik, meski masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Pertama, rasio pengusaha Muslim masih rendah sehingga pihak terkait perlu mendorong munculnya pengusaha-pengusaha Muslim, seperti menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk peran dari lembaga zakat. Kedua, pertumbuhan UMKM di Provinsi Jawa Tengah juga masih rendah. Hal ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah karena UMKM mampu menyerap lebih banyak jumlah tenaga kerja dan menjadi salah satu penopang perekonomian nasional. Terkait dengan kedua hal di atas, pemerintah dan lembaga zakat dapat saling bekerjasama atau bermitra.

Kedua, praktik ekonomi syariah di provinsi ini juga masih cukup rendah, sehingga perlu upaya yang lebih serius dari berbagai pihak untuk mendorong masyarakat dalam mengakses perbankan syariah, baik dari sisi demand (akses meminjam) maupun supply (melakukan simpanan). Ketiga, di dalam upaya untuk meningkatkan literasi zakat, serta penghimpunan dan penyaluran dana zakat peran pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat sangat dibutuhkan, khususnya dalam melakukan edukasi kepada masyarakat serta perbaikan manajemen pengelolaan lembaga zakat. Ketiga, perlu dukungan infrastruktur baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil (termasuk lembaga zakat) agar rasio Masjid Mushola seimbang dengan jumlah penduduk Muslim di Kalimantan Selatan.



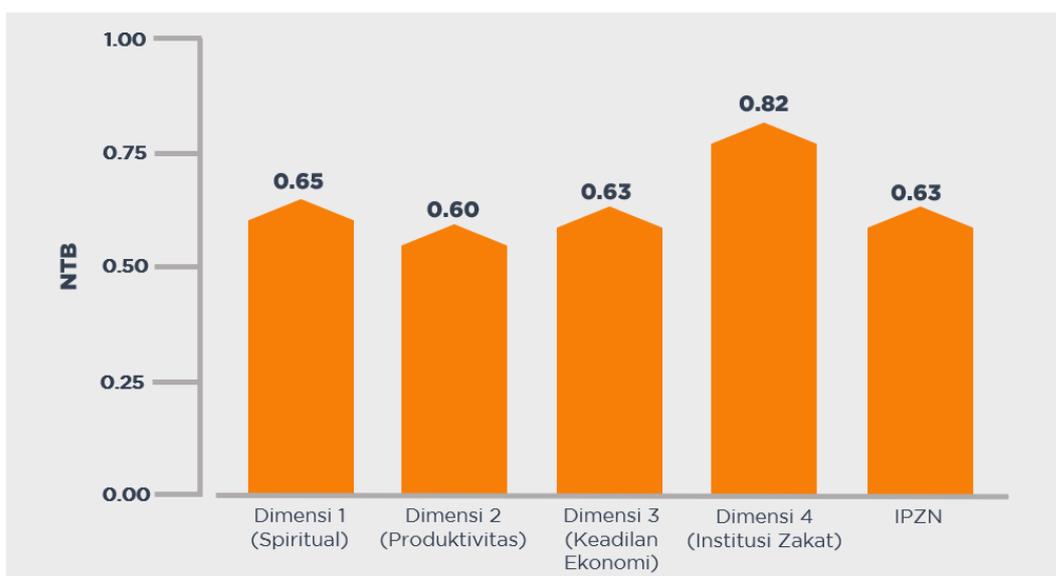
Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Zakatnomics

Provinsi NTB

3.10 Provinsi NTB

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat banyak lembaga Zakat dan Lembaga Wakaf. Secara umum pengelolaan dana zakat di di Nusa Tenggara Barat berada di bawah koordinator BAZNAS (BAZIS) Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan pengelolaan wakaf berada pada BWI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain BAZNAS pada level Provinsi, di Nusa Tenggara Barat juga terdapat BAZNAS tingkat kabupaten/kota. Demikian juga dengan LAZ dan Lembaga Wakaf, selain berkedudukan di tingkat provinsi, banyak LAZ dan Lembaga Wakaf yang tersebar di setiap kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020 jumlah penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai 5.320.092. Persentase penduduk miskin pada tahun 2020 mencapai 13,97% dan mengalami peningkatan menjadi 14,14% pada tahun 2021. Sementara itu, persentase pengangguran terbuka pada tahun 2020 sebesar 4,22% dan sedikit mengalami penurunan menjadi 3,97% pada tahun 2021. Secara administrative, Provinsi NTB terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota.



Gambar 3.14 Nilai Dimensi IPZN Provinsi NTB

Sumber: Data di olah, 2021

Pada tahun 2021 nilai Indeks Pembangunan Zakatnomics di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 0,63 dan masuk ke dalam kategori baik. Hal ini menggambarkan bahwa secara keseluruhan kesadaran dalam membangun tatanan ekonomi baru untuk mencapai kebahagiaan, kesetimbangan kehidupan dan kemuliaan hakiki manusia yang berlandaskan semangat dan nilai luhur syariah zakat yang meliputi semangat ketakwaan, produktif, adil, serta semangat untuk membumikan ZISWAF dalam kehidupan sehari-hari di Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah baik.

Berdasarkan dimensi, institusi zakat merupakan dimensi yang memperoleh nilai tertinggi yaitu 0,82 dan masuk dalam kategori sangat baik. Besaran nilai pada dimensi ini didukung oleh tingginya nilai ACR, banyaknya jumlah UPZ di BAZNAS baik level provinsi maupun kabupaten, serta banyaknya OPZ yang memiliki database mustahik. Sebaliknya, indeks literasi wakaf dan pertumbuhan pengumpulan ZIS masih mendapatkan nilai yang cukup rendah.

Dimensi spiritual mendapatkan nilai sebesar 0,65 dan masuk ke dalam kategori baik. Beberapa indikator yang mendapatkan nilai tinggi pada dimensi ini adalah banyaknya rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri, banyaknya lembaga pendidikan Islam non pesantren, serta banyaknya jumlah pesantren. Sementara itu, beberapa variabel yang masih mendapatkan nilai rendah adalah jumlah Masjid dan Mushola, spiritual poverty line, potensi rawan pemurtadan, serta tingginya angka kriminalitas di Provinsi NTB.

Dimensi keadilan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah 0,63 dan masuk dalam kategori baik. Besaran nilai dimensi keadilan ekonomi ini didukung oleh rendahnya tingkat pengangguran di Provinsi NTB, banyaknya jumlah muzakki, termasuk tingginya tingkat literasi keuangan. Indikator yang memiliki nilai rendah adalah elastisitas PAD terhadap PDRB, serta rasio pembiayaan perbankan syariah dibanding dengan perbankan konvensional.

Dimensi yang mendapatkan nilai paling rendah di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah dimensi produktivitas, yaitu 0,60 sehingga masuk ke dalam kategori cukup baik. Besaran nilai dimensi produktivitas ini didukung oleh tingginya Angka Partisipasi Murni, serta adanya visi misi yang mendukung produktivitas ekonomi, termasuk rendahnya kemiskinan di NTB. Sementara itu, beberapa indikator yang masih memiliki nilai rendah adalah inovasi dan kreativitas, sedikitnya jumlah pengusaha, rendahnya pertumbuhan UMKM, serta rendahnya pertumbuhan PAD.

Secara keseluruhan nilai IPZN Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah baik, meski demikian beberapa indikator masih perlu untuk diperbaiki. Pertama, terkait dengan rendahnya indeks literasi wakaf dan pertumbuhan pengumpulan dana ZIS yang masih rendah diperlukan peran dari tokoh agama dan akademisi dalam melakukan edukasi kepada masyarakat. Selain itu, dalam upaya untuk meningkatkan pengumpulan ZIS, lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ perlu melakukan terobosan baru agar terjadi peningkatan yang signifikan. Kedua, perlu dukungan infrastruktur baik dari pemerintah maupun masyarakat sipil (termasuk lembaga zakat) agar rasio Masjid dan Mushola seimbang dengan jumlah penduduk Muslim di NTB.

Ketiga, pemerintah perlu melakukan terobosan agar elastisitas Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB meningkat signifikan. Keempat, inovasi dan kreativitas di provinsi ini juga masih rendah, oleh karena itu pemerintah perlu melakukan terobosan agar terjadi peningkatan inovasi dan kreativitas, tentu saja dengan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat. Keempat, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat sipil –termasuk lembaga zakat- diharapkan dapat bersinergi untuk mendorong peningkatan jumlah pengusaha Muslim dan pertumbuhan UMKM. Kelima, Pemerintah perlu melakukan terobosan agar Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan yang signifikan.



4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Implementasi IPZN tahun 2021 ini dilakukan di 9 provinsi di Indonesia yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Secara umum Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai IPZN tertinggi dengan skor 0,68 yang masuk dalam kategori baik. Disusul dengan Provinsi DKI dan Sumatera Barat dengan skor 0,67 yang juga masuk dalam kategori baik. Selanjutnya Provinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan memiliki skor 0,66 yang juga masuk dalam kategori baik. Provinsi Jabar berada pada ranking 6 dengan skor 0,65 yang masuk dalam kategori baik. Ranking ke 7 adalah provinsi NTB dengan skor 0,63 masuk dalam kategori baik, Ranking ke 8 adalah Provinsi Sulawesi Selatan dengan skor 0,62 yang juga masuk kategori baik dan di Ranking ke 9 adalah Provinsi Sumatera Utara dengan skor 0,60 yang masuk dalam kategori cukup baik.

Pada dimensi pertama yaitu dimensi spiritual Provinsi Kalimantan Timur memiliki nilai tertinggi dengan nilai 0,75 yang masuk kategori baik dan Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai terendah di dimensi ini dengan nilai 0,59. Provinsi yang memiliki nilai tertinggi pada dimensi ini mengindikasikan bahwa secara umum kondisi spiritual di provinsi tersebut dalam hal *habluminallah* dan *habluminannas*, dukungan regulasi dan infrastruktur keagamaan berada dalam kategori baik.

Pada dimensi kedua yaitu dimensi produktivitas, provinsi yang mendapatkan skor tertinggi adalah provinsi DKI Jakarta dengan nilai 0,87 dan masuk pada kategori sangat baik. Selanjutnya, provinsi yang mendapatkan skor terendah pada dimensi ini adalah provinsi NTB yang masuk pada kategori cukup baik. Provinsi Salah satu faktor yang menyebabkan provinsi DKI Jakarta memiliki nilai tertinggi adalah karena Jakarta adalah Ibukota Indonesia dan merupakan pusat kegiatan perekonomian di Indonesia. Tingkat produktivitas yang tinggi di DKI Jakarta ini menunjukkan bahwa budaya, daya saing, kualitas

SDM, dan juga peran pemerintahan di DKI Jakarta ini saling mendukung untuk mewujudkan budaya produktivitas yang kuat.

Nilai tertinggi pada dimensi keadilan ekonomi yang merupakan dimensi ketiga pada implementasi IPZN ini diraih oleh dua provinsi dengan masing-masing nilai 0,71, yaitu pada provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan dan masuk pada kategori baik. Nilai keadilan ekonomi terendah terdapat pada provinsi Sumatera Utara dengan nilai 0,54. Praktik ekonomi syariah merupakan salah satu variabel pada dimensi keadilan ekonomi ini dan dari hasil survey ini dapat kita lihat bahwa praktik ekonomi syariah pada provinsi Sumatera Barat dan Kalimantan Selatan sudah baik, sehingga mendukung keadilan ekonomi dalam implementasi zakatnomics.

Pada dimensi terakhir yaitu institusi ZISWAF, Provinsi DKI Jakarta memiliki skor dimensi yang paling tinggi dengan nilai 0,84 yang masuk dalam kategori sangat Baik. Banyaknya kementerian, lembaga negara, serta perusahaan-perusahaan besar yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta menyebabkan pengumpulan dan penyaluran zakat sangat tinggi di Provinsi ini. Selain pengumpulan dan penyaluran zakat, di Provinsi DKI juga banyak terdapat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sehingga skor ketersediaan lembaga zakat menjadi tinggi. Sebaliknya jika melihat nilai literasi Zakat dan Wakaf, nilai literasi keduanya di Provinsi DKI Jakarta masih tergolong moderat sehingga perlu menjadi perhatian para OPZ untuk lebih meningkatkan kampanye zakat sehingga literasi masyarakat terhadap zakat dan wakaf dapat meningkat. Lebih lanjut, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki skor dimensi 4 terendah dengan nilai 0,68 yang masuk dalam kategori baik. Artinya, Pengumpulan dan penyaluran zakat, literasi zakat dan wakaf, serta ketersediaan UPZ di Provinsi ini tidak terlalu tinggi jika dibandingkan provinsi lainnya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan dari penelitian Indeks Pembangunan Zakatnomics di 9 Provinsi yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi masukan untuk 9 provinsi tersebut sebagaimana berikut:

- 1) Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih yang pertama adalah terkait dengan aspek spiritualitas, tingkat rawan pemurtadan di 9 provinsi yang masih tinggi, tingkat kriminalitas yang masih tinggi di hampir seluruh provinsi kecuali Kalimantan Timur, rasio jumlah mushola/masjid dibandingkan jumlah penduduk muslim di 9 provinsi masih relatif rendah, dan Jumlah pesantren yang masih sedikit di Provinsi DKI Jakarta. Maka hasil penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah daerah untuk menyusun program-program yang memiliki implikasi terhadap naiknya tingkat spiritualitas masyarakat dan menurunkan tingkat kriminalitas di wilayahnya masing-masing
- 2) Aspek kedua adalah terkait dengan produktivitas, jumlah pengusaha muslim dan pertumbuhan UMKM masih rendah di hampir sembilan provinsi, selain itu Provinsi Kalimantan Barat dan NTB memiliki tingkat inovasi dan kreatifitas paling rendah. Dengan demikian hasil studi ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mengoptimalkan anggaran daerahnya masing-masing untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai upaya seperti memfasilitasi kegiatan edukasi kewirausahaan secara masif, pembukaan akses permodalan bagi masyarakat untuk berwirausaha, pembukaan akses pasar bagi UMKM, serta pendampingan dan evaluasi secara berkelanjutan.
- 3) Aspek ketiga adalah berkaitan dengan keadilan ekonomi, hampir di seluruh provinsi yang menjadi sampel penelitian tingkat praktek ekonomi syariah-nya masih rendah, khususnya pada jumlah pembiayaan syariah

dan DPK Bank syariah. Maka studi ini merekomendasikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah serta otoritas terkait yang memiliki kepentingan dalam memperkuat praktik ekonomi syariah untuk bersinergi dalam menyusun program-program yang berkaitan dengan edukasi praktik ekonomi syariah di tengah masyarakat serta memperkuat regulasi seperti penyusunan Undang-Undang Ekonomi Syariah. Di samping itu, pemerintah pusat dan daerah juga perlu memberikan insentif bagi pelaku bisnis ekonomi syariah untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah potensial agar praktik ekonomi syariah dapat menjangkau seluruh wilayah-wilayah tersebut.

- 4) sedangkan untuk dimensi institusi ZISWAF rata rata provinsi memiliki nilai yang baik, kecuali indeks literasi wakaf DKI Jakarta dan Penyaluran dana ZIS di Kalimantan Selatan yang masih rendah. Dengan demikian, studi ini merekomendasikan kepada seluruh stakeholder ZISWAF baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga zakat, lembaga wakaf dan juga pemangku kepentingan lainnya untuk secara bersama-sama menguatkan tiga aspek krusial dalam pengembangan ZISWAF yaitu penguatan sistem berupa penguatan regulasi, penguatan internal berupa penguatan tatakelola dan SDM dalam pengelolaan ZISWAF, dan penguatan eksternal yaitu penguatan edukasi, literasi dan kesadaran di tengah masyarakat terkait dengan pentingnya berkontribusi dalam pembayaran ZISWAF dalam rangka membangun ketahanan serta kemajuan ekonomi di wilayah tersebut.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2020). Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah 2017-2019. <https://www.bps.go.id/indicator/34/101/1/jumlah-tindak-pidana-menurut-kepolisian-daerah.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Angka Partisipasi Murni (A P M) 2018-2020. <https://www.bps.go.id/indicator/28/304/1/angka-partisipasi-murni-a-p-m-.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah 2020-2021. <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Persentase Rumah Tangga menurut Provinsi dan Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak (Persen), 2018-2020. <https://www.bps.go.id/indicator/29/847/1/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi-dan-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak.html>
- Badan Pusat Statistik. (2017). Indeks Kebahagiaan Menurut Provinsi 2014-2017. <https://www.bps.go.id/indicator/34/601/1/indeks-kebahagiaan-menurut-provinsi.html>
- Dinar Standard. (2020). *State of the Global Islamic Economy Report*. Dubai: Salam Gateway.
- KNEKS. (2019). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi Syariah.
- OJK. (2021). Statistik Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2017). *Indeks Zakat Nasional*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2018). Indeks Rawan Pemurtadan. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS; PEBS UI. (2019). *Konsep Dasar Zakatnomics*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS .

- Puskas BAZNAS. (2020a). *Indeks Pembangunan Zakatnomics*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2020b). *Indikator Pemetaan Potensi Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Puskas BAZNAS. (2020). INDEKS LITERASI ZAKAT 2020 - REGIONAL KALIMANTAN. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2020). INDEKS LITERASI ZAKAT 2020 - REGIONAL SULAWESI. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2020). INDEKS LITERASI ZAKAT 2020 - REGIONAL SUMATERA. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2020). INDEKS LITERASI ZAKAT 2020 - REGIONAL JAWA, BALI DAN NTB. Puskas BAZNAS.
<https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1290-indeks-literasi-zakat-2020-regional-jawa-bali-dan-ntb>
- Puskas BAZNAS. (2021). INDEKS ZAKAT NASIONAL 2020: ACEH, SUMATERA UTARA, JAMBI, BENGKULU. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2021). INDEKS ZAKAT NASIONAL 2020: BALI, JAWA TIMUR, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2021). INDEKS ZAKAT NASIONAL 2020: BANTEN, DI YOGYAKARTA, JAWA TENGAH. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2021). INDEKS ZAKAT NASIONAL 2020: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, KEPULAUAN RIAU, DKI JAKARTA, JAWA BARAT. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2021). INDEKS ZAKAT NASIONAL 2020: RIAU, SUMATERA BARAT, SUMATERA SELATAN, LAMPUNG. Puskas BAZNAS. Jakarta
- Puskas BAZNAS. (2021). Official News Hasil Pengukuran Kaji Dampak 2020. <https://drive.google.com/file/d/1ntd5JD7lqA5uFiUjKEc6wIWu8Pny-73y/view>
- Waluyo, D. B. (2019, November 12). *BI : Nilai ekonomi syariah Indonesia capai 80 persen dari PDB*. Retrieved from antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/1158816/bi-nilai-ekonomi-syariah-indonesia-capai-80-persen-dari-pdb>

PUSAT KAJIAN STRATEGIS

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Matraman Raya No. 134, Kb. Manggis, Kec. Matraman, Jakarta 13150

ISBN 978-623-6614-96-9



9 786236 614969